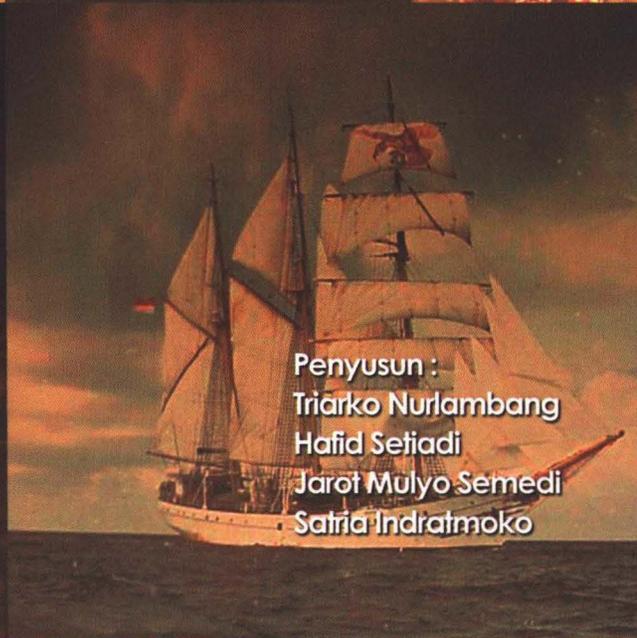
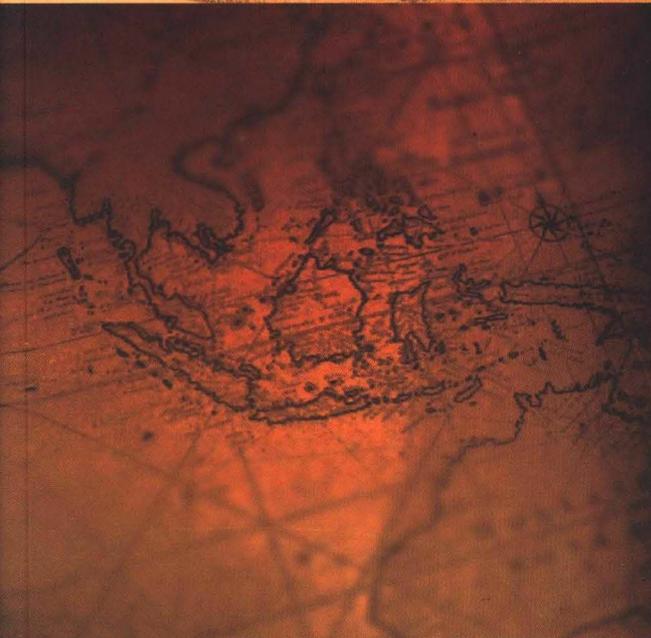
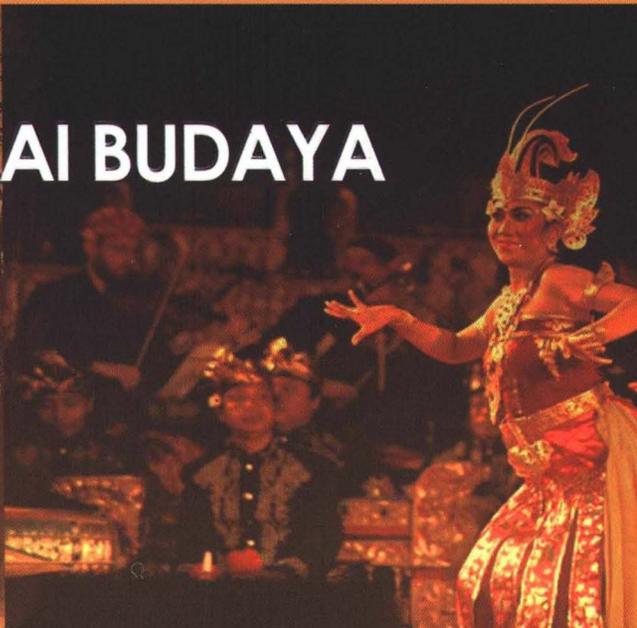
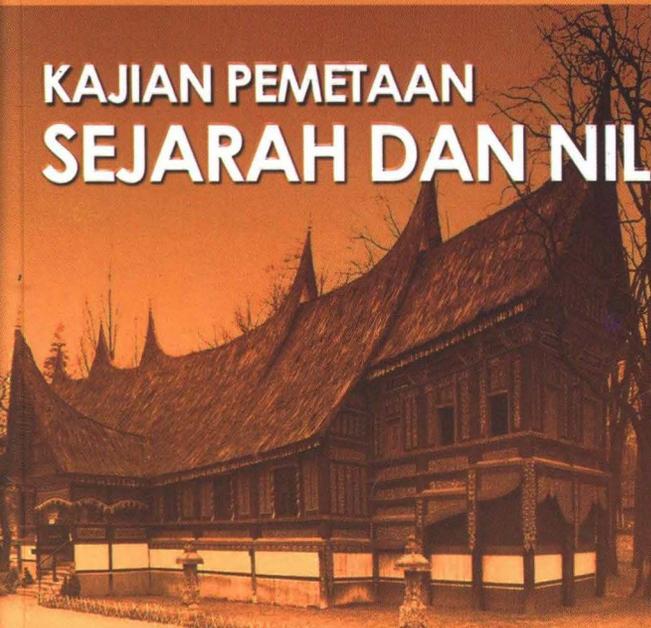




Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
2014

KAJIAN PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA



Penyusun :
Triarko Nurlambang
Hafid Setiadi
Jarot Mulyo Semedi
Satria Indratmoko

ISBN 978-602-1289-15-0

**KAJIAN PEMETAAN
SEJARAH DAN NILAI BUDAYA**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
2014

Penyusun:

Triarko Nurlambang

Hafid Setiadi

Jarot Mulyo Semedi

Satria Indratmoko

Editor:

Kasijanto Sastrodinomo

Endjat Djaenuderadjat

Tata Letak:

Fider Tendiardi

Penerbit:

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270

ISBN 978-602-1289-15-0

Hak cipta dilindungi Undang-undang

2014

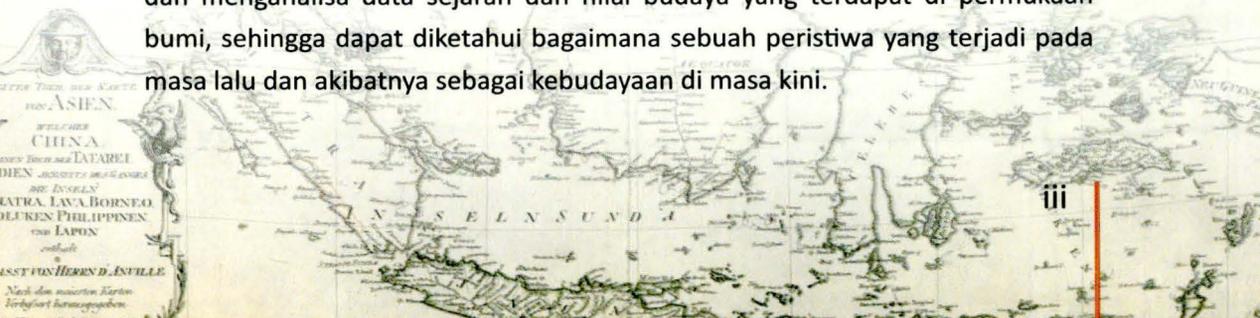


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya telah selesai disusun. Penyusunan Kajian Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya merupakan salah program kerja Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014.

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku pedoman Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya untuk Pemetaan Sejarah yang telah dicetak tahun 2013. Selain berisi tentang urgensi pemetaan sejarah dan nilai budaya dalam konteks pembentukan jati diri bangsa, buku ini juga berisi tentang prosedur, tata cara, serta monitoring dan evaluasi di lapangan kaitannya dengan pemetaan nilai budaya. Buku Kajian Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya berisi tentang kajian normatif, kajian substantif dan kajian teknis operasional, serta berisi *lesson learnt* yang dapat dijadikan referensi oleh semua pihak khususnya para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan strategis terkait pemetaan sejarah dan nilai budaya dalam konteks pembentukan jati diri bangsa.

Dalam pemetaan sejarah dan nilai budaya, objek dan fenomena kebudayaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa masa lalu dan kebiasaan dari sebuah komunitas tidak terlepas dari gejala geografi yang nampak di permukaan bumi seperti: sungai, gunung, hutan, dan sebagainya. Hubungan wujud yang saling mempengaruhi antara kedua jenis gejala tersebut dapat diketahui melalui sebuah sistem informasi yang mampu mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisa data sejarah dan nilai budaya yang terdapat di permukaan bumi, sehingga dapat diketahui bagaimana sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan akibatnya sebagai kebudayaan di masa kini.



Buku ini telah mengalami perbaikan berdasarkan masukan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semoga buku Kajian Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional khususnya pihak yang konsen dalam bidang Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya.

Jakarta, November 2014

Direktur Sejarah dan Nilai Budaya

Endjat Djaenuderadjat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 LATAR BELAKANG	1
1.1. Isu Aktual Terkait Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya.....	1
1.2. Tujuan.....	9
1.3. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran.....	9
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	12
2.1. Basis Teori dan Konsep	12
2.2. Basis Teori Normatif, Substantif, dan Teknis Operasional.....	16
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	22
3.1. Teknik Kajian dan Pengumpulan Data.....	22
3.1.1. Teknik Kajian	22
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data	25
BAB 4 KEBIJAKAN PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	28
4.1. Peta Sejarah dan Peta Nilai Budaya	28
BAB 5 MANFAAT PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA.....	39
5.1. Manfaat Ideal	39
5.2. Manfaat Praktis	42
BAB 6 PROSES PENYUSUNAN PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA.....	47
6.1. Teknologi Pemetaan	47

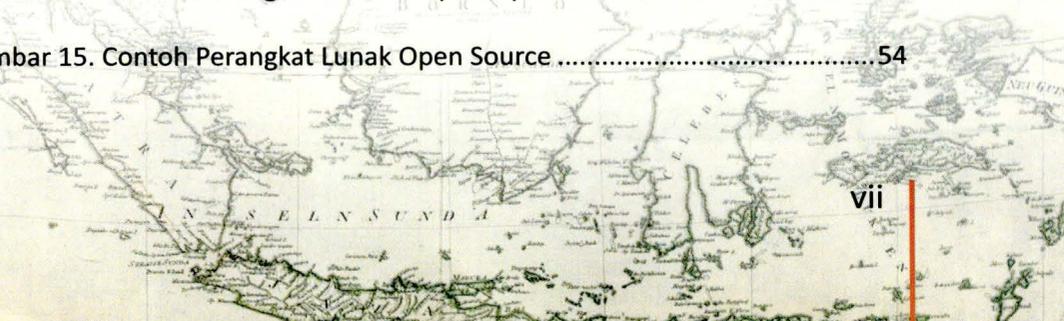


6.2. Metode Pemetaan Sejarah	55
6.2.1. Pemilihan Topik.....	55
6.2.2. Pengumpulan Sumber	56
6.2.3. Pemetaan.....	57
6.2.4. Verifikasi	59
6.2.5. Interpretasi	59
6.3. Metode Pemetaan Nilai Budaya	60
6.3.1. Pemilihan Topik.....	60
6.3.2. Pengumpulan Data	62
6.3.3. Pemetaan.....	63
6.3.4. Verifikasi	65
6.3.5. Interpretasi	66
6.4. Publikasi Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya	67
6.5. Proses Pembelajaran	70
BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	71
7.1. Kesimpulan	71
7.2. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Masuknya Bangsa Eropa ke Wilayah Nusantara	8
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Kajian.....	15
Gambar 3. Makna dan Konseptual.....	17
Gambar 4. Peta Sebagai Produk Teknologi.....	19
Gambar 5. Peta dalam Praktek Pemetaan.....	20
Gambar 6. Peta dari Data hingga Kebijakan	21
Gambar 7. Kerangka Teoritis dan Konsep Kajian	23
Gambar 8. Kerangka Kerja Kajian	24
Gambar 9. Proses Pembentukan Nilai Lokasi ataupun Tempat	29
Gambar 10 Skema Proses Pengintegrasian Budaya.....	31
Gambar 11. Struktur Organisasi Dirjen Budaya Kemendikbud.....	34
Gambar 12. Tahapan dari konsep Ideal menjadi terealisasi	42
Gambar 13. Contoh Data Spasial dan Non Spasial	49
Gambar 14. Contoh Perangkat Lunak Propietary	53
Gambar 15. Contoh Perangkat Lunak Open Source	54



Gambar 16. Perubahan Lingkungan Fisik Wilayah Pati.....56

Gambar 17. Peta Situs Sejarah Skala Besar58

Gambar 18. Peta Kejadian Sejarah Skala Kecil..... 58

Gambar 19. Ilustrasi Pembagian Wilayah Berdasarkan Marga dan Batas Administratif Desa..... 62

Gambar 20. Contoh Peta Sketsa Hasil Pemetaan Partisipatif64

Gambar 21. Contoh Penggambaran/Symbolisasi Wujud Kebudayaan Tradisi Lokal65

Gambar 22. Peta yang Digunakan dalam Proses Verifikasi Lapangan66



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya dalam Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35
Tabel 2. Indikasi Anggaran Untuk Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya Tahun Anggaran 2010-2014.....	37
Tabel 3. Agenda Prioritas Nomor 8 dan 9.....	41
Tabel 4. Contoh Citra Satelit yang Umum Digunakan dalam Pemetaan	51
Tabel 5. Fenomena Kebudayaan.....	60





BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1. Isu Aktual Terkait Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya

Sebagai sebuah ilmu, “sejarah” menaruh perhatian pada penyelidikan terhadap dinamika kehidupan manusia dalam kaitannya dengan peristiwa dan kejadian di masa lalu. Sejarah berkewajiban memberikan penafsiran tentang masa lalu. Jadi sejarah pada dasarnya merupakan sebuah bahasa ide. Karena merupakan tafsiran, maka dapat dikatakan juga bahwa sejarah adalah sebuah proses pemikiran yang diupayakan oleh manusia untuk memahami diri dan lingkungannya melalui pemahaman akan kejadian-kejadian lampau dalam suatu kerangka waktu. Frederick & Soeroto (2005) menyatakan bahwa pemikiran sejarah paling tidak mengandung 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- **Waktu** sebagai pangkal pemikiran sejarah. Dengan menerapkan unsur waktu maka masa lampau akan dapat diukur secara tepat. Oleh sebab itu unsur waktu bersifat mutlak. Para ahli sejarah memandang waktu sebagai sesuatu yang berjalan secara langgeng dan teratur. Setiap penggal perjalanan waktu harus dapat diuraikan sesuai dengan ciri khasnya sehingga dapat memberikan kerangka guna menafsirkan masa lampau.
- **Fakta** baik berupa keterangan yang bersifat abstrak maupun mutlak. Fakta merupakan unsur penting guna menarik makna tertentu yang paling mendekati kebenaran dalam memahami masa lampau. Dengan



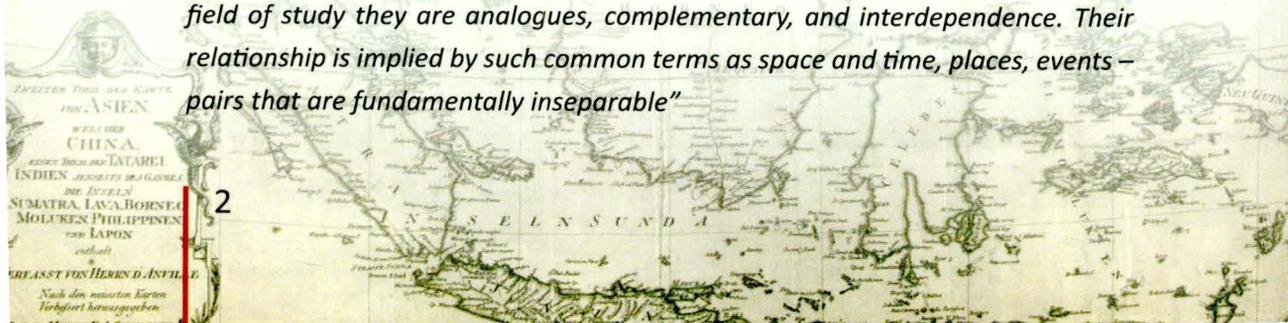
demikian, fakta bukan merupakan sesuatu yang dapat diterima begitu saja, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dan diperlakukan secara hati-hati.

- **Kausalitas** antara beberapa kejadian dalam waktu yang bersamaan atau berurutan. Pengungkapan hubungan sebab akibat akan menguraikan "kerumitan" masa lampau sehingga dapat menghasilkan pendapat tentang kaitan antara berbagai kejadian. Hal ini antara lain didasarkan oleh adanya kesadaran tidak ada penyebab tunggal dalam kemunculan suatu kejadian. Dengan demikian, pemikiran sejarah bukan saja menjawab *kapan* suatu kejadian terjadi, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* terjadinya.

Dalam falsafah keilmuan, "ruang (*space*)" dan "waktu (*time*)" selalu dipandang secara terintegrasi. Oleh sebab itu kondisi *timeless space* dan *spaceless time* tidak diakui keberadaannya. Samuel Alexander, seorang ahli filsafat asal Inggris, pada tahun 1920 menyatakan: "*all vital problems of philosophy depend for their solution of the problem of what 'space' and 'time' are and more particularly how they are related to each other*". Meskipun ungkapan di atas dinyatakan dalam konteks filsafat ilmu, konsep ruang dan waktu selalu dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai aktivitasnya, manusia selalu melakukan organisasi ruang dan waktu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan perlu memperlakukan kedua konsep tersebut secara lebih nyata demi kemajuan kehidupan manusia.

Menurut disiplin keilmuannya, ilmu geografi selalu berkaitan dengan persoalan ruang, sedangkan ilmu sejarah selalu berkaitan dengan persoalan waktu. Dalam berbagai kasus di Indonesia, kedua ilmu tersebut seringkali berjalan secara terpisah. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Meinig (1978), geografi dan sejarah sebenarnya berakar pada satu hal yang sama.

"Geography and history are rooted in the basic stuff of human existence. As field of study they are analogues, complementary, and interdependence. Their relationship is implied by such common terms as space and time, places, events – pairs that are fundamentally inseparable"



Oleh karenanya, antara kedua disiplin tersebut tercipta hubungan saling melengkapi dan saling ketergantungan. Soemarsaid Martono (*dalam De Graff & Pigeaud, 2003*) menyatakan bahwa penelitian sejarah selalu memerlukan kejelasan akan batas temporal dan spasial sehingga diperoleh gambaran sebab akibat yang utuh, tuntas, dan tidak timpang. Selanjutnya, Lombard (2005) juga menyatakan bahwa tak satu pun ancangan sejarah akan mencapai tujuannya tanpa memperhatikan faktor geografis.

Pada sisi lain, Ogilvie (1952) mengungkapkan tentang pentingnya elemen waktu dalam kajian geografi. Ia menyatakan: *because geography is concerned primarily with space rather time, we are inclined to take the time-element inherent in our own work*. Dalam kaitannya tersebut Hartshorne (1959) menyatakan bahwa dimensi waktu memiliki peran penting dalam analisis geografi, antara lain:

- Untuk mendapatkan penjelasan atau deskripsi yang representatif mengenai siklus atau fluktuasi fenomena tertentu dalam suatu periode pada "saat ini".
- Untuk menentukan kecenderungan saat ini sebagai dampak kumulatif dari perubahan yang terjadi di masa lalu dalam waktu yang relatif panjang.
- Untuk mengkaji keterkaitan antar gejala yang terjadi pada masa kini melalui pemahaman terhadap keterkaitan serupa yang tercipta di masa lalu namun dengan karakter yang berbeda

Butlin (1993) menyatakan "geografi sejarah" adalah kajian geografis tentang masa lampau atau *study of the geographies of past time*. Kajian tersebut dilakukan melalui rekonstruksi imajinatif dalam suatu rentang waktu dengan menekankan pada pemahaman integratif terhadap dinamika kehidupan dalam suatu area. Adapun hal yang menjadi pusat perhatian dalam kajian geografi sejarah adalah fenomena atau proses keruangan yang menggambarkan dinamika keterkaitan antara manusia-lingkungan antara lain dalam hal memanfaatkan sumberdaya alam, membangun permukiman, mengembangkan kekuasaan, mengontrol teritori, dan sebagainya.



Nilai budaya merupakan sebuah nilai yang muncul dari konsepsi-konsepsi alam pikiran manusia. Carl O. Sauer menyatakan bahwa geografi budaya adalah ilmu pengetahuan yang menelaah sekitar tingkah laku yang ditimbulkan karena adanya usaha adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam oleh manusia dalam usaha mempertahankan hidupnya. Budaya pada umumnya condong menggambarkan karakteristik suatu wilayah yang biasanya dibatasi oleh kondisi fisik suatu wilayah, misalnya di wilayah pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena masyarakat tersebut berusaha mensiasati alam sebagai sumber kehidupannya dengan menciptakan alat-alat penangkap ikan yang merupakan pencerminan budaya setempat.

Unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat terdiri dari tujuh unsur yang dapat menunjukkan perbedaan budaya dari satu daerah dengan daerah lainnya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut antara lain:

- Religi
- Kekerabatan
- Sistem Pengetahuan
- Bahasa
- Kesenian
- Mata Pencaharian
- Teknologi

Dari ketujuh unsur kebudayaan di atas, maka perwujudan dari sebuah kebudayaan dapat dilihat dari munculnya gagasan/ide/nilai yang ada di suatu wilayah sehingga membentuk sebuah sistem sosial di masyarakat. Wujud kebudayaan lain yang bersifat fisik juga dapat dilihat dari bentuk-bentuk bangunan di suatu wilayah yang pada umumnya mencerminkan pedoman hidup bermasyarakat.

Pemetaan nilai budaya berfungsi untuk menggambarkan berbagai unsur kebudayaan yang mencerminkan adanya konsep kehidupan yang khas secara keruangan sehingga tergambar perbedaan dan kemiripan nilai budaya dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap wujud kebudayaan dapat menjelaskan/mengandung beberapa unsur kebudayaan sekaligus sehingga dari setiap wujud



kebudayaan dapat diperoleh berbagai macam informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Hasil pemetaan tidak dapat mengungkap “nilai budaya” jika tidak dilengkapi dengan penjelasan dan penafsiran dari si pembuat peta.

Carl O. Sauer mengungkapkan beberapa tema yang dapat diangkat dalam kajian geografi sejarah dan budaya. Tema-tema tersebut antara lain adalah :

Gejala geografi fisik tertentu yang mempengaruhi perubahan muka bumi seperti halnya perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia dan kembali menimbulkan dampak terhadap manusia, perubahan-perubahan gejala alami pada bagian tertentu yang mengakibatkan perubahan tutupan vegetasi, atau tentang gejala alami lainnya (perubahan garis pantai, perubahan pola tata air, dsb).

Kajian tentang manusia beserta perilakunya yang mengakibatkan perubahan alam. Kajian tentang tata letak permukiman, tipologi perumahan, dan pola permukiman yang antara lain berkaitan erat dengan nilai budaya dan cara pandang manusia dalam mengatasi kendala fisik dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam kepemilikan, penguasaan, dan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan dinamika struktur sosial politik dalam lingkup budaya tertentu.

Perkembangan atau siklus kebudayaan yang memunculkan pusat-pusat peradaban sehubungan dengan perkembangan penduduk, kemajuan teknologi, dan dinamika daya dukung lingkungan. Pola-pola pembauran antar kelompok masyarakat yang dikaitkan dengan difusi informasi dan pengetahuan dari satu tempat ke tempat lain. Termasuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan masyarakat dalam menerima nilai budaya baru Konflik-konflik teritorial yang berkaitan dengan adanya kelompok dominan yang bersifat agresif dan kelompok marjinal baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial

Sejarah dan nilai budaya adalah faktor penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai sejarah dan nilai budaya dalam kehidupan dikembangkan dalam satu daerah, komunitas dan masyarakat yang akan membentuk sikap dan kepribadian setiap orang yang hidup di dalamnya. Hubungan sejarah dan nilai budaya dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam membentuk harapan dan cita-cita masa



depan sebuah daerah antara lain melalui proses pelestarian, pengembangan dan Jika diletakkan dalam konteks skala yang lebih luas, sejarah dan nilai budaya adalah "ladang" bagi terbentuknya karakter bangsa. Dari setiap sejarah dan nilai budaya lahir bangsa dan negara berkarakter yang kemudian memiliki kontribusi pada pembentukan kapasitas ekonomi, sosial dan kultral suatu bangsa. Kontribusi tersebut terbangun mulai dari satuan daerah, komunitas dan masyarakat pada skala kecil hingga yang paling besar pada skala nasional.

Sehingga *the founding father* Presiden Soekarno mengungkapkan istilah *JASMERAH* (*Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah*). Ungkapan tersebut bukanlah sesuatu yang diucapkan begitu saja, melainkan mempunyai makna yang mendalam. Sebagai sebuah bangsa yang besar dan telah melewati peristiwa sejarah yang sangat panjang, bangsa Indonesia tentu saja mempunyai pengalaman-pengalaman di masa lampau yang mempengaruhi secara langsung kehidupan bernegara dan berbangsa. Begitu juga dengan pembentukan karakter suatu bangsa yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa di masa lampau.

Pada konteks pembangunan pemahaman mengenai sejarah dan nilai budaya dapat ditelusuri dari berbagai perspektif. Perspektif antropologis memahami bahwa sejarah dan nilai budaya adalah sebuah wadah bagi suatu masyarakat untuk menciptakan sekaligus mempertahankan suatu kebudayaan. Sementara itu, perspektif politik melihat sejarah dan nilai budaya sebagai sel kekuatan dan kekuasaan yang memungkinkan setiap kronologisnya muncul dan diingat oleh masyarakat dengan daya tawar yang lebih tinggi guna mempengaruhi keputusan politis. Adapun menurut sudut pandang ekonomis, sejarah dan nilai budaya adalah pemasok sumberdaya manusia yang berkarakter yang akan memberikan dampak simultan dan kumulatif terhadap kepribadian masyarakat.

Sejarah perkembangan pembangunan kota-kota besar di Indonesia lebih banyak dimulai dari wilayah pantai. Sebagai negara dengan posisi geografis yang menguntungkan, Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis tidak hanya berada di persilangan jalur transportasi laut antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, tetapi juga aspek kemaritiman Indonesia yang telah membawa nama Indonesia berjaya dan disegani di kancah dunia oleh nenek moyang



terutama pada kekuatan maritimnya. Sumber sejarah dan karya-karya sejarah sudah telah menunjukkan bahwa dahulu perairan Indonesi menjadi perairan teramai di dunia. Dinamika pelayaran dan perdagangan sejak awal abad masehi sudah berkembang sangat pesat dan ramai oleh para pedagang dari mancanegara untuk mendapatkan rempah-rempah, kapur barus, kayu cendana dan lain-lain komoditas yang dibutuhkan di luar negeri. Dalam dinamika pelayaran dan perdagangan tersebut, kapal dan perahu dagang dari seluruh Nusantara dan dari mancanegara hadir dan singgah di banyak pelabuhan di Nusantara. Selain Batavia (saat ini Jakarta) sebagai ibukota negara saat itu, daerah yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa dari luar negeri untuk melakukan kegiatan perdagangan adalah Ternate, Ambon, Makassar, Pontianak dan Sumatera Barat (Padang).

Buku pelayaran yang ditulis oleh Jan Huygen van Linschoten, seorang pelaut Belanda yang pernah mengikuti pelayaran Portugis ke India menyatakan bahwa rute yang dilalui oleh bangsa Eropa khususnya kolonial Belanda yang dinahkodai oleh Cornelis de Houtman adalah menyusuri Samudera Hindia melalui Selat Sunda, Banten dan menyusuri laut utara Jawa dan Nusatenggara dan akhirnya tiba di Ambon dan Ternate. Untuk memperkuat diri menghadapi persaingan perdagangan, Belanda membentuk Persekutuan Dagang Hindia Timur yang letaknya di Ambon dan Ternate. Proses-proses akulturasi di wilayah ini mulai berkembang pada zaman itu mulai dari pola ruang wilayah hingga pola sosial budaya masyarakatnya.

Proses akulturasi pada wilayah Pesisir Barat Sumatera dan Kalimantan Bagian Barat umumnya dipengaruhi oleh syiar Islam melalui nuansa kerajanan dan kesultanan yang dibawa oleh saudagar dari India, Arab dan Persia yang tertarik akan komoditi di daerah tersebut. Pesisir Barat Sumatera pada kenyataannya jarang dikunjungi kapal-kapal yang membawa para saudagar, karena keadaan pantainya yang terjal dengan ombak Samudera Indonesia yang ganas. Namun, para saudagar India, Arab, dan Persia yang datang ke pelabuhan di pantai barat dikarenakan tertarik akan komoditi perdagangan yang banyak dicari pada masa itu, yaitu kapur barus dan beberapa hasil hutan lainnya. Sementara itu, proses akulturasi di Pontianak juga cukup unik dimulai dari munculnya etnis Tionghoa



yang jumlahnya cukup banyak dan sebagian ada yang beragama Islam didahului oleh panglima besar mereka yang singgah di Pontianak, yaitu Laksmana Cheng Ho. Selain itu juga, pola sosial budaya masyarakat yang unik terutama pada daerah pinggiran sungai yang merupakan alat transportasi utama.

Dengan melihat keunikan proses akulturasi dan heterogenitas budaya di atas yang terjadi pada beberapa wilayah di Nusantara, maka pada kajian ini dipilih wilayah yang akan dijadikan sebagai *lesson learnt* terkait sejarah dan nilai budaya, yaitu Kota Ternate, Kota Pontianak dan Kota Sumatera Barat yang memiliki latar belakang geografisnya adalah pesisir dengan keunikan dan heterogenitas budaya di dalamnya.



Gambar 1. Masuknya Bangsa Eropa ke Wilayah Nusantara

Sementara itu, perkembangan sejarah dan nilai budaya pada masa kekinian dapat dilihat bahwa beberapa dekade terakhir ini, bangsa Indonesia banyak melupakan pelajaran sejarah, sehingga hikmah dan pelajaran dari masa lampau yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan saat ini tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, karakter bangsa Indonesia yang telah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu perlahan-lahan mulai luntur. Hal ini apabila dibiarkan tentu saja bisa menjadi bahaya bagi kelanjutan kehidupan berbangsa di masa



substansif terhadap teori dan dalil yang berkembang secara dinamis dari dulu hingga kini; dan kajian teknis operasional terhadap proses pemetaan sejarah dan nilai budaya yang telah berlangsung di lapangan.

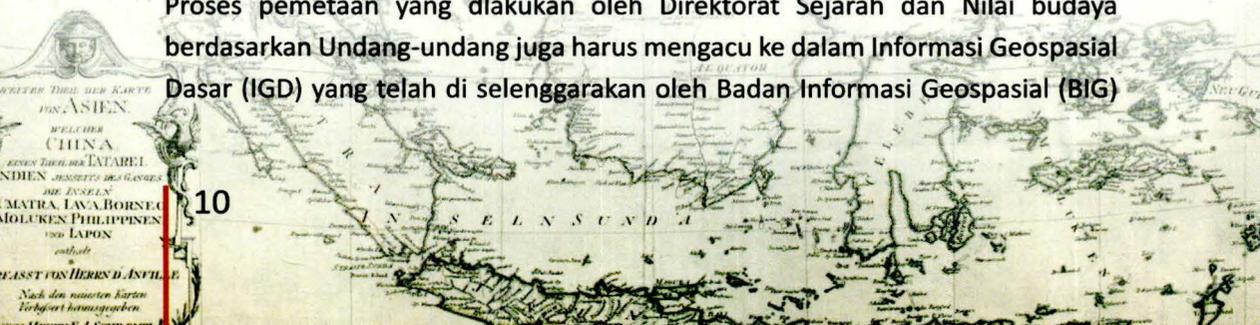
Agar dapat memahami proses dan perkembangan isu-isu kekinian terkait pemetaan sejarah dan nilai budaya, maka kajian ini memilih 3 (tiga) lokasi yang ada di Indonesia sebagai daerah *lesson learnt* yang mewakili sejarah dan nilai budaya dengan keunikan dan heterogenitas proses akulturasi yang terjadi hingga kini, yaitu Kota Padang, Kota Pontianak dan Kota Ternate. Rasionalitas pemilihan dan karakter dari lokasi tersebut telah dijelaskan di latar belakang dan akan dijelaskan lebih detil pada bab-bab berikutnya.

Sementara itu, penyajian informasi baik proses maupun produk kebudayaan dapat disajikan ke dalam bentuk peta yang memiliki jenis dan fungsi masing-masing. Namun, dalam penyajiannya tetap menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 23 ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa:

1. IG yang berjenis IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
2. Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya memiliki tugas dan fungsi dalam pemetaan sejarah dan nilai budaya yang tidak ada pada institusi manapun, sehingga memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemetaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Proses pemetaan yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai budaya berdasarkan Undang-undang juga harus mengacu ke dalam Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang telah di selenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)



agar keluaran peta yang dihasilkan akan memiliki keseragaman dalam geometri wilayahnya. Kebijakan penggunaan IGD dari BIG dalam setiap pemetaan yang diselenggarakan di Indonesia bertujuan untuk menyeragamkan peta dasar sehingga pengguna informasi dapat memanfaatkan informasi dari berbagai instansi tanpa mengalami permasalahan perbedaan bentuk atau luas geometri wilayahnya. Kebijakan penggunaan satu IGD atau kebijakan satu peta dasar (*one map policy*) ditujukan agar para pengambil kebijakan dapat membuat kebijakan yang bersifat keruangan dengan baik dan tanpa menimbulkan konflik batas.

Kebijakan Satu Peta atau “*One Map Policy*” terlahir karena IGT yang dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi) Selama IGT tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan (BIG) maka IGT yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Pemanfaatan IGD sebagai acuan dalam pemetaan sejarah dan nilai budaya memberikan nilai lebih dari proses pemetaan itu sendiri karena penyelenggara IGT sejarah dan nilai budaya tidak perlu menyiapkan informasi peta dasar dalam menggambarkan fenomena sejarah dan nilai budaya pada peta.



BAB 2

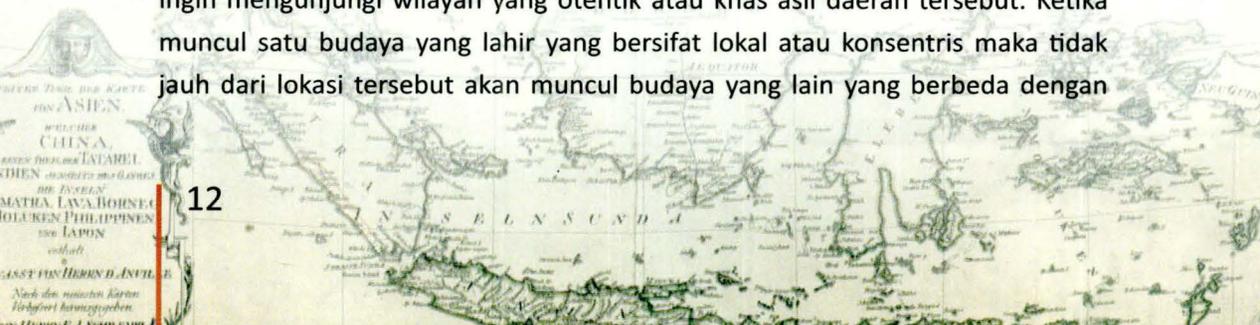
KERANGKA BERPIKIR

Pada dasarnya kajian ini tidak bertujuan mengetes atau menguji teori, tetapi mengembangkan atau mungkin menemukan dan membangun teori. Itulah sebabnya teori yang dibangun merupakan sarana untuk mengarahkan kajian ini menjadi lebih terstruktur. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai basis teori, konsep berpikir dan basis teori normatif, substantif dan teknis operasional dalam kajian pemetaan sejarah dan nilai budaya.

1.1. Basis Teori dan Konsep

Menurut Featherstone (Endraswara, 2006:7), ada 3 (tiga) konsep yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sejarah dan nilai budaya, yaitu: *Pertama*, produksi kebudayaan. Kebudayaan diciptakan berdasarkan pertimbangan konsumen. Jika konsumen penuh maka akan muncul kebudayaan baru dan akan muncul inovasi-inovasi yang akan membuat lahirnya budaya baru.

Kedua, *socio genesis* kebudayaan. Kebudayaan akan terikat oleh *boundary* (lingkup) atau lingkungannya. Lingkup sosial akan menciptakan produk budaya yang lain, karena diantara unsur sosial budaya tersebut saling terkait. Bahkan, diantara unsur saling ketergantungan. Misalnya, ketika turis domestik atau manca Negara datang ke Yogya atau Solo, maka seketika itu juga akan terbesit pemikiran ingin mengunjungi wilayah yang otentik atau khas asli daerah tersebut. Ketika muncul satu budaya yang lahir yang bersifat lokal atau konsentris maka tidak jauh dari lokasi tersebut akan muncul budaya yang lain yang berbeda dengan



kemasan yang berbeda pula yang pada akhirnya akan menciptakan *branding image* dari lokasi tersebut.

Ketiga, psycho genesis kebudayaan. Kebudayaan dapat muncul dari dorongan kejiwaan. Karena itu muncul budaya-budaya lembut yang bersifat spiritual. Budaya semacam ini merupakan tuntutan alamiah naluri jiwa manusia sebagai pemenuhan kebutuhan batin. Kadang-kadang budaya semacam ini jauh dari kepentingan material melainkan kepuasan bathin.

Dari pendapat di atas, kebudayaan dan konteksnya sangat luas, sehingga untuk mempelajari kebudayaan dan turunannya, Prof. Koentjaraningrat membaginya menjadi 7 (tujuh) unsur kebudayaan yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum. Harapannya dengan unsur-unsur tersebut, orang dapat memahami dengan baik bagaimana budaya itu muncul yang dinilai baik dari produk maupun proses. Munculnya budaya baik sebagai produk dan proses tersebut sangat berkaitan dengan ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran pada disiplin ilmu geografi dalam melihat segala fenomena di muka bumi termasuk sejarah dan nilai budaya didalamnya untuk dapat dipahami, dianalisa dengan baik proses dan produknya. Ruang dan waktu yang dikenal juga lingkungan budaya akan besar pengaruhnya terhadap budaya itu sendiri. Lingkungan budaya ini yang membentuk ekosistem budaya. Dari sini selanjutnya akan terbentuk ekologi budaya yang akan dipengaruhi oleh *political space* dan *cultural agency*. Hasanadi, dkk (2012) mencontohkan hubungan antara *political space* dan *cultural agency* di Sumatera Barat memiliki rumah gadang, rendang dan kini mulai menguat sebagai sentral identitas ras melayu melalui bahasa dan tari-tariannya. Di daerah lain, wilayah Kabupaten Magelang memiliki Gunung Tidar yang konon dipuncaknya terdapat pakuning jawa atau paku yang ditancapkan (menggokohkan) tanah Jawa ketika Goncang.

Endraswara (2006) menambahkan bahwa ketika *political space* dan *cultural agency* tersebut menguat di hati pemilik dan pelaku budaya terutama di wilayah awal munculnya budaya tersebut, maka akan muncul dengan sendirinya *branding image* (citra budaya) di daerah tersebut. Citra budaya ini yang mendorong



tumbuhnya jati diri budaya tertentu pada tingkat lokal dan jika di apresiasi dengan baik pada tingkat Nasional maka bisa menjadi salah satu bentuk jati diri negara itu sendiri. Namun, yang perlu disadari bahwa “citra budaya” ini ada dua jenis, yaitu alami dan buatan. Citra budaya buatan akan mudah luntur dan hilang manakala banyak pengaruh kepentingan politik di dalamnya. Citra budaya tersebut merupakan bagian dari proses dan produk kebudayaan. Proses dan produk ini dapat dituangkan dan divisualisasikan, salah satunya dalam bentuk peta.

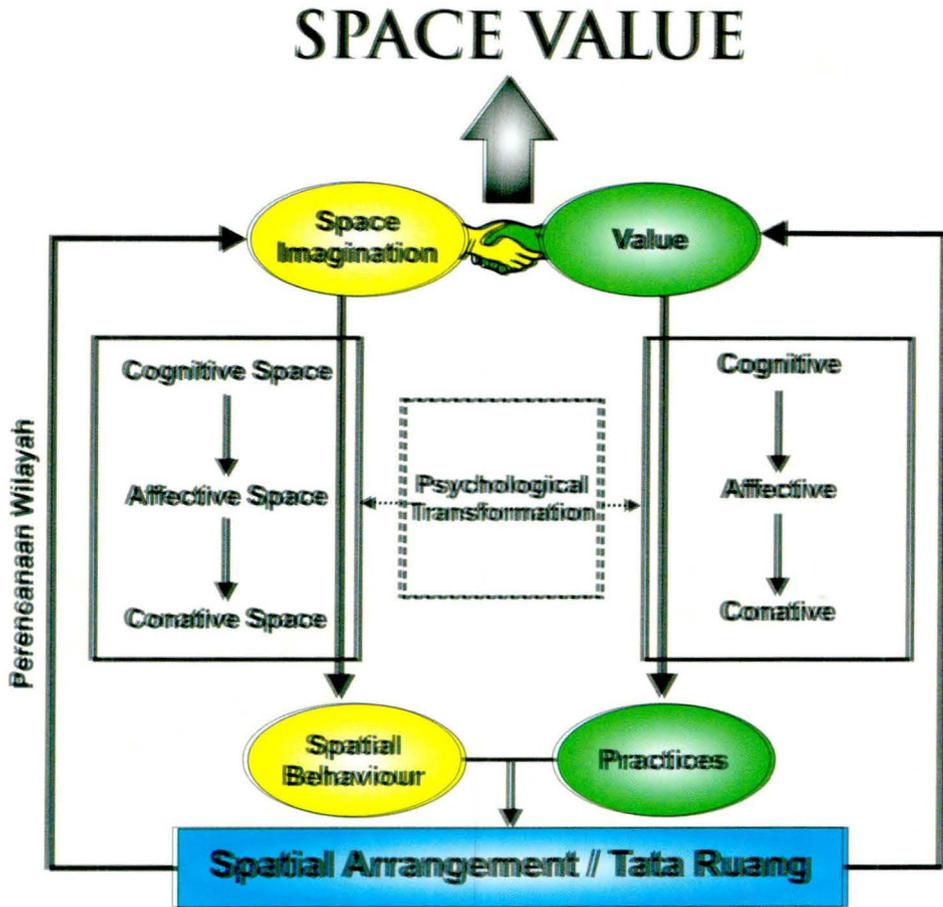
Upaya untuk mengkaji secara terstruktur dalam rangka memahami dan menganalisa dengan baik proses dan produk sejarah dan nilai budaya dalam kajian pemetaan ini, maka dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran yang dalam kajian ini kerangka tersebut diadopsi dan dikembangkan dari kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam disiplin ilmu psikologi ketika melihat fenomena di masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai (pengetahuan kognitif, afektif dan konatif) dan imajinasi. Kerangka pemikiran tersebut dalam kajian ini dikenal dengan istilah “*space value*”.

Space value dapat merefleksikan apakah kajian pemetaan sejarah dan nilai budaya ini dapat berkontribusi bagi pembangunan budaya atau karakter jati diri bangsa atau secara lebih luas dan makro lagi dalam merencanakan pembangunan Nasional. *Cognitive Space* itu dibangun seperti juga kita melihat dan memahami bagaimana nilai dan perilaku dapat tumbuh kembang bak memperkuat ataupun menjadi pengkurusan.

Affective Space merupakan perasaan suka tidak suka terhadap suatu situs yang terkadang banyak orang/masyarakat yang tidak merasa terikat terhadap situs tersebut. Di dalam disiplin ilmu geografi dikenal dengan *Topophilia* dan *Topophobia*. Renz (1992) dalam tesisnya mengenai *Topophobia, Topophilia dan Malcom Lowry: Perspektif Lingkungan* mengatakan bahwa *Topophobia* terjadi Jika tempat itu menakutkan atau sakral, maka tempat itu bisa tidak menjadi tempat yang *civilize*, dalam pengertian ditakutkan oleh masyarakat secara luas. Sementara itu, jika suatu tempat itu menyenangkan atau semua orang merasa



senang dan menginginkan keberadaan tempat tersebut maka dikenal dengan *Topophilia*.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Kajian

Ketika proses *cognitive space* dan *affective space* telah terjadi di suatu tempat maka muncullah istilah *conative space*, yaitu perilaku yang terkait dengan nilai-nilai pada tempat tersebut yang terus berkembang. Proses dan keterkaitan nilai-nilai tersebut yang akan membentuk *spatial behaviour* (perilaku spasial).

Upaya untuk membangun atau merencanakan tata ruang wilayah pada tingkat lokal hingga tingkat Nasional dapat mempertimbangkan *space value* atau nilai suatu tempat tersebut. Dan yang lebih prioritas lagi adalah ketika ingin membangun jatidiri bangsa maka dapat dimulai dengan mempertimbangkan *space value* ini.

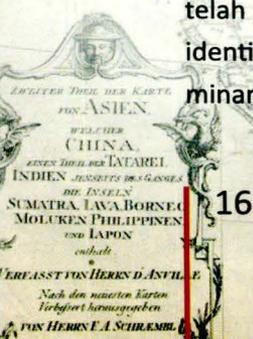
1.2. Basis Teori Normatif, Substantif, dan Teknis Operasional

Landasan empiris untuk melihat perlunya mengkaji pemetaan sejarah dan nilai budaya dalam konteks pembangunan jatidiri bangsa maka akan ada banyak sekali hal/kriteria yang bisa dijadikan sebagai landasan. Namun, pendekatan praktis yang dapat dijadikan sebagai landasan salah satunya adalah pengalaman, pelajaran (*lesson learnt*) dari nilai-nilai yang dipertahankan ketika terjadi proses terbentuknya kebudayaan hingga produk yang dihasilkan baik yang berupa benda (*tangible*) maupun yang bukan benda (*intangible*).

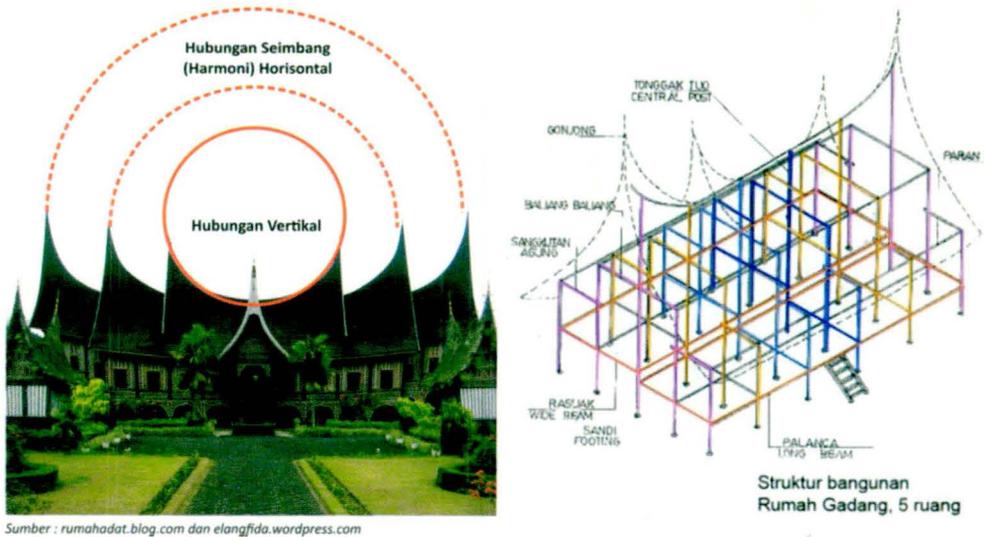
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya. Bentuk fisik negara kepulauannya semakin membuat negara ini kaya akan budaya yang berasal dari daerah pesisir maupun yang berasal dari pedalaman, hutan dan gunung.

Transformasi Nilai Lokal menjadi Identitas Bangsa

Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dikenal tidak hanya karena daerah yang hampir setiap tahun menjadi langganan gempa bumi, tetapi juga dikenal sebagai salah satu ikon budaya melayu melalui tarian, bahasa dan rumah gadangnya. Rumah gadang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi terkait dengan identitas keminangkabauannya. Bangunan bersejarah ini sering dilihat hanya sebagai benda fisik semata, namun ketika ditelusuri lebih lanjut setiap gaya arsitektur, seni, corak dan serangkaian proses pembuatan bangunan tersebut memiliki arti dan nilai yang secara alamiah telah menjadi *brand image* Sumatera Barat. Jika bangunan ini hilang maka identitas minangkabau juga akan hilang. Fungsi dan peran rumah gadang di minangkabau sangat banyak, diantaranya fungsinya adalah sebagai tempat



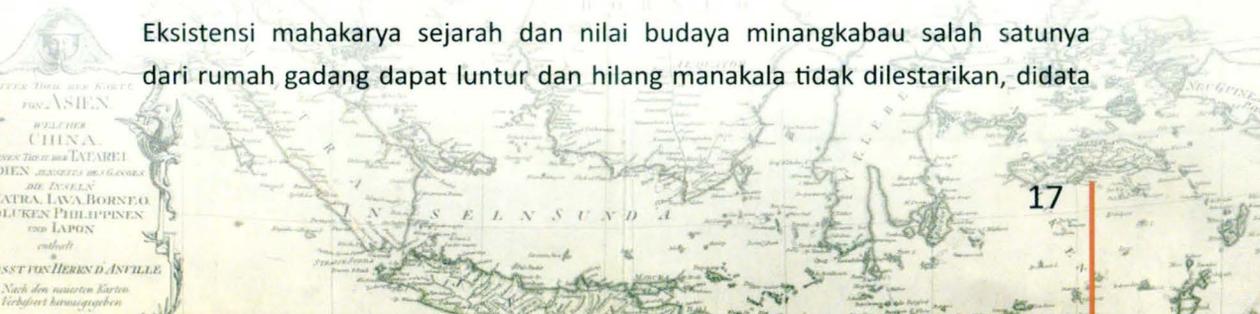
tinggal; perwujudan eksistensi keluarga; tempat pelaksanaan berbagai upacara; pusat kegiatan keluarga (musyawarah, penyelesaian sengketa, dll); dan tempat merawat keluarga.



Gambar 3. Makna dan Konseptual

Menurut Hasanadi, dkk (2012) Secara konseptual, cara hidup dan kepercayaan masyarakat minangkabau dipengaruhi oleh sistem genealogis matrilineal, dimana posisi kaum perempuan memegang peranan yang sangat penting, bahkan karena peranan strategisnya secara simbolik dimplementasikan pada saat pembuatan rumah gadang, yakni ketika membuat kamar dengan ketentuan ibu (bundo/mande: bahasa minang) dan anak perempuan memiliki kamar terdepan. Ketika sudah memiliki suami maka akan bergeser ke tengah. Laki-laki tua, duda dan bujangan tidur di surau milik suku/kaumnya masing-masing.

Eksistensi mahakarya sejarah dan nilai budaya minangkabau salah satunya dari rumah gadang dapat luntur dan hilang manakala tidak dilestarikan, didata



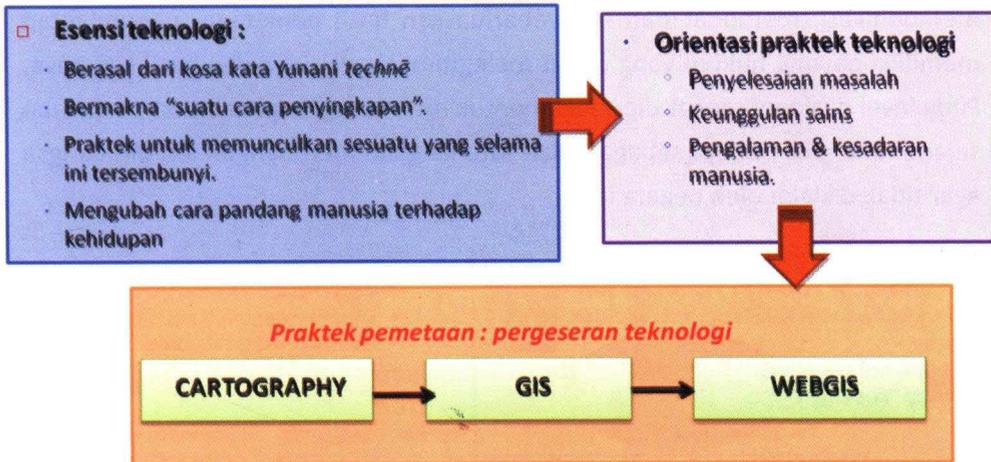
dan tidak dipertahankan nilai-nilai strategis yang terdapat di dalamnya. Begitu banyak *space value* yang dihasilkan baru dari satu contoh bangunan rumah gadang, tentunya masih banyak lagi contoh di daerah lain di Nusantara yang jika ditelusuri maka bisa menjadi *brand image* termasuk menjadi bagian cara hidup dan ketentuan dalam bermasyarakat di daerah tertentu. Dengan kajian pemetaan sejarah dan nilai budaya ini, seyogyanya dapat menjadi salah satu isu strategis dalam rangka mencegah *last resources* kebudayaan ini agar tidak hilang. Karena ketika hilang maka identitas jati diri bangsa ini juga akan hilang arah.

Peta sebagai Produk Teknologi

Saat ini, perkembangan teknologi telah berlangsung secara cepat dan masif di berbagai bidang terutama dibidang sistem informasi. Perkembangan yang pesat ini didorong oleh permintaan masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Maka muncullah teknologi yang pada prakteknya dapat memunculkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dan mengubah cara pandang (*point of view*) manusia terhadap kehidupan.

Namun, orientasi teknologi pada prakteknya tetap mempertimbangkan pengalaman manusia dan keunggulan sains dalam rangka memastikan teknologi tersebut dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Praktek pemetaan yang terjadi hingga saat ini merefleksikan praktek pemetaan dulu yang bersifat konvensional (kartografis) kemudian dikembangkan menjadi Sistem Informasi Geografi (SIG) yang dapat menganalisa setiap permasalahan yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Dan saat ini, sedang berkembang praktek pemetaan berbasis web/jaringan internet yang dalam disiplin ilmu geografi dikenal dengan sebutan "*virtual geography*". Sehingga, ketika sudah berbasis web maka data dapat digunakan dan diperbaharui oleh publik, tentunya tetap mempertimbangkan prinsi pemetaan dan peraturan yang berlaku. Dalam praktek pemetaan ini, peran Badan Informasi Geospasial menjadi paling strategis dalam kaitan membangun basis data yang baik sekaligus mengevaluasi data yang telah ada (dibuat semacam "*clearing house*").





Gambar 4. Peta Sebagai Produk Teknologi

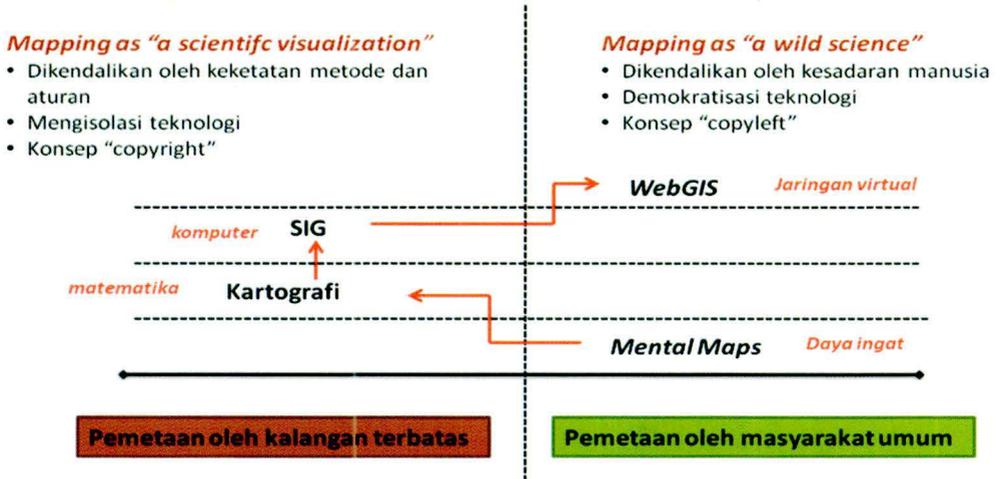
Peta dalam Praktek Pemetaan

Perkembangan teknologi di atas telah memicu para kalangan terbatas, seperti akademi, praktisi dan masyarakat umum untuk dapat mempergunakannya dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Praktek pemetaan yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi merupakan proses visualisasi secara ilmiah yang dikendalikan oleh keketatan metode, aturan dan terkesan mengisolasi teknologi. Dan hasil dari pemetaan tersebut, pada akhirnya menganut konsep *copyright* atau hak cipta yang mewajibkan setiap produknya harus memiliki lisensi. Sementara itu, praktek pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat umum merupakan proses ilmiah yang bebas "liar" yang dikendalikan oleh kesadaran manusia yang sangat dinamis dan tidak dapat dibatasi sehingga memiliki kesan liar. Oleh karena itu, disitu terjadi demokratisasi teknologi yang memiliki arti bahwa masyarakat tidak terpaku oleh peraturan yang ketat, bebas dan hasil dari pemetaan tersebut memiliki konsep "*copyleft*" atau tidak ada larangan untuk menyebarluaskan dan memodifikasi hasil yang telah ada sebelumnya.

Pada konteks kajian pemetaan sejarah dan nilai budaya ini, dibutuhkan kedua konsep tersebut, dimana masyarakat dan pemangku kepentingan dapat



memodifikasi, membuat dan menyebarkan hasil pemetaan, namun tetap memiliki payung hukum yang dapat melegitimasi posisinya dan hasil karyanya. Pada level nasional sangat diperlukan untuk melindungi segenap aset pemetaan sejarah dan nilai budaya sebagai salah satu langkah membangun jati diri bangsa agar tidak diklaim oleh negara lain.

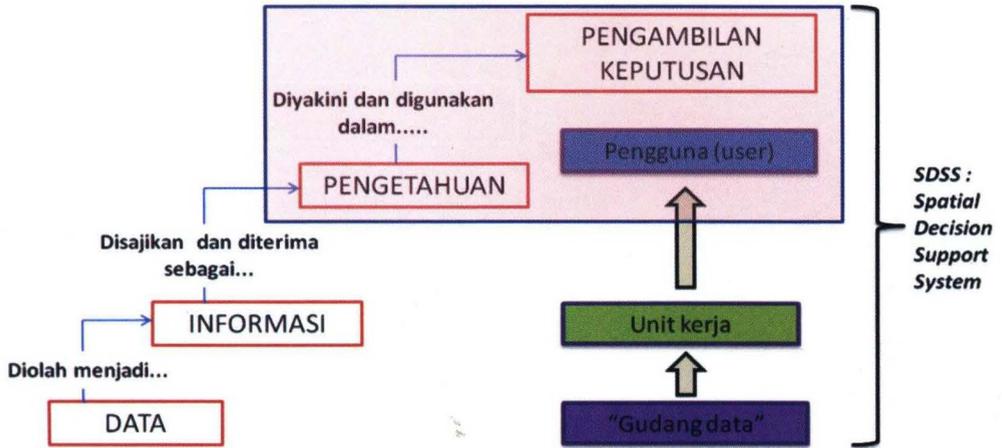


Gambar 5. Peta dalam Praktek Pemetaan

Peta dari Data hingga Kebijakan

Dari kerangka pemikiran, proses *lesson learnt* dan peran peta dalam pemetaan sejarah dan nilai budaya di atas, maka pendataan dan pemetaan sejarah dan nilai budaya menjadi hal yang perlu dilakukan dalam rangka memperoleh data yang dapat disajikan dan diterima menjadi sebuah informasi strategis yang diyakini dan digunakan baik sebagai landasan empiris maupun sebagai landasan berpikir dan pedoman dalam rangka mendukung para pemangku kebijakan dalam mengambil sebuah kebijakan, rencana dan program terkait sejarah dan nilai budaya.





Gambar 6. Peta dari Data hingga Kebijakan



BAB 3

METODE PELAKSANAAN

1.1. Teknik Kajian dan Pengumpulan Data

Serangkaian teknik kajian dan pengumpulan data yang dilakukan pada kajian ini umumnya sama seperti metode penelitian ilmiah kontemporer yang biasa dilakukan oleh para peneliti. Namun, ada beberapa perbedaan pada teknik kajiannya. Teknik kajian yang dilakukan pada studi ini merupakan penyederhanaan dari metode kajian ilmiah seperti penelitian historis, penelitian korelasional, penelitian kausal-komparatif, dan penelitian teknis. Teknik kajian tersebut mempertimbangkan berbagai hubungan antar subjek dan objek penelitian seperti aspek kesejarahan, hubungan kausal antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana dengan masyarakat, dan implementasi keberlanjutan nilai sejarah dan nilai budaya yang dilestarikan dari skala lokal hingga nasional.

1.1.1. Teknik Kajian

Dalam mencapai target informasi yang ingin dicapai, maka teknik kajian yang dilakukan pada studi ini dibagi menjadi 3 (tiga) pendekatan kajian, yaitu (1) kajian normatif; (2) kajian substantif; (3) kajian teknis operasional.

1. Kajian Normatif

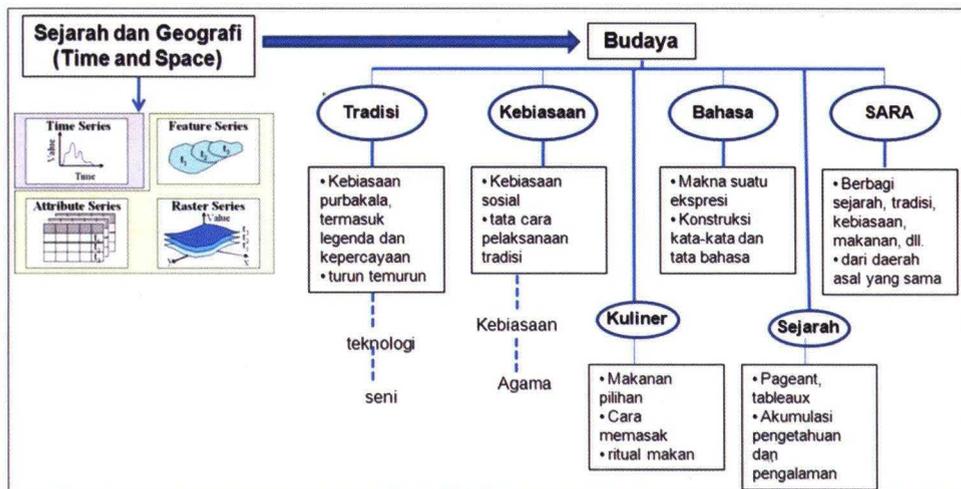
Mengkaji secara kebijakan, kelembagaan dan peraturan pelaksanaan. Kajian normatif dapat menghasilkan informasi diantaranya:



- a. Informasi kebijakan, rencana dan program yang dibuat oleh instansi daerah terkait dengan pemetaan sejarah dan nilai budaya,
- b. Gambaran alokasi anggaran dan *positioning* kebijakan terkait pemetaan nilai sejarah dan budaya di suatu daerah.
- c. Gambaran proses pembuatan kebijakan Tata Ruang dan Pelibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama SKPD yang memiliki tupoksi tentang pemetaan sejarah dan nilai budaya.

2. Kajian Substantif

Mengkaji tentang teoritis, konsep ataupun dalil yang digunakan dari pengetahuan yang berkembang dari dahulu hingga kini. Kemudian dilihat aplikasi dan nomenklatur yang digunakan serta pengembangannya dengan memperhatikan nilai-nilai kekinian. Pada kajian ini harapannya bias mendapatkan suatu temuan yang biasa digunakan sebagai alternatif pemikiran. Isi pada kajian ini dapat dijadikan sebagai bekal fundamental dan esensial pada kajian teknis operasional.



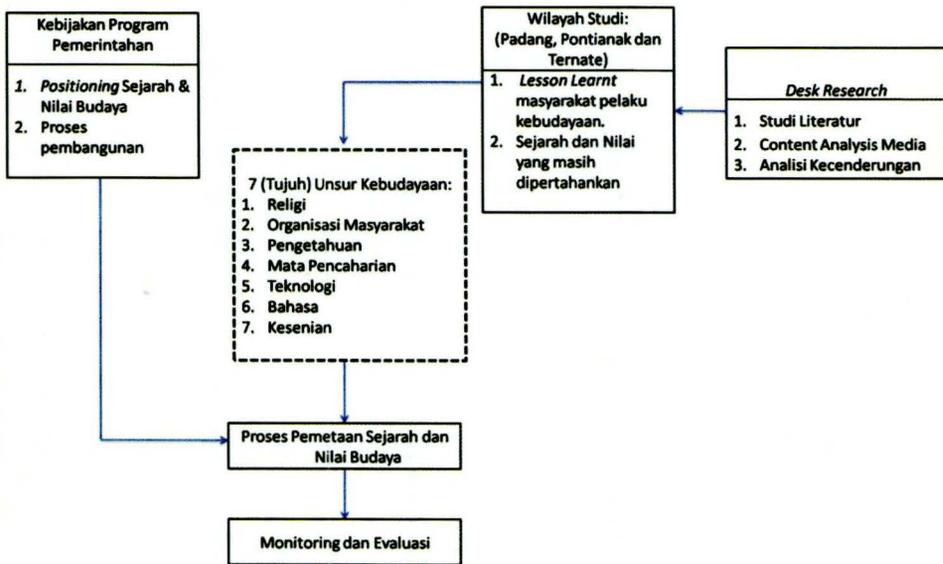
Gambar 7. Kerangka Teoritis dan Konsep Kajian



3. Kajian Teknis Operasional

Mengkaji secara teknis bagaimana rumusan pedomannya, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai di lapangan dan monitoring serta evaluasi. Monitoring dan evaluasi harus ada tidak hanya untuk mengetahui progress dari masing-masing pelaksana atau penyelenggara tetapi juga melihat apakah pedoman teknisnya sudah dibuat sebelumnya atau apakah pada kajian substantif belum memahami betul substansi kajiannya.

Serangkaian bentuk kajian dan proses kerja di atas, secara lebih sederhana dapat dilihat pada gambar mengenai kerangka kerja di bawah ini.



Gambar 8. Kerangka Kerja Kajian

Melalui *desk study* dari studi literatur, buku-buku kajian tematik sejarah dan nilai budaya akan diperoleh gambaran umum profil sejarah dan nilai budaya wilayah studi, kecenderungan isu kekinian yang terjadi dan kronologis terbangunnya karakter budaya wilayah studi. Berawal dari *desk study* tersebut maka proses pengumpulan data dan informasi di lapangan akan lebih terstruktur sehingga dapat dilihat secara langsung proses *lesson learnt*, hambatan dan kendala dalam

mempertahankan nilai-nilai kesejarahan dan budayanya.

Proses *lesson learnt* nilai-nilai kesejarahan dan budayanya dilihat dan dianalisa dengan mengadopsi dari 7 (tujuh) unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat, yaitu (1) religi, (2) organisasi masyarakat, (3) pengetahuan, (4) mata pencaharian, (5) teknologi, (6) bahasa, dan (7) kesenian. Pada proses yang bersamaan, kajian ini mengkaji proses pengambilan kebijakan pembangunan pemerintahan khususnya terkait dengan *positioning* dan arah pembangunan suatu daerah dan orientasinya terhadap sejarah dan nilai budaya. Selanjutnya, proses pemetaan sejarah dan nilai budaya dalam rangka inventarisasi dapat dilihat hambatan dan kendala di lapangan. Hal ini yang menjadi bekal dalam monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi disini tidak seperti pada penyusunan laporan yang detil dan memperlihatkan grafik dan statistik seperti laporan Lakip, melainkan bentuk laporan mengenai manfaat praktis dan ideal kajian serta kendala di lapangan baik teknis operasional maupun kebijakan, rencana dan program pemerintah yang berkaitan dengan pemetaan sejarah dan nilai budaya.

1.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan diambil dari 3 kota, yaitu Kota Padang, Kota Ternate dan Kota Pontianak. Pengamatan tersebut dilakukan pada dua jenis objek, yaitu objek sejarah dan objek nilai budaya. Objek sejarah merupakan situs/objek peninggalan sejarah yang memiliki peranan masa lalu. Sedangkan objek nilai budaya merupakan pelaku budaya yang melakukan proses dan menghasilkan produk kebudayaan yang hingga kini masih dipertahankan, seperti komunitas adat, kampung adat serta tradisi di dalamnya yang masih dilestarikan.

Penentuan Sampel dan Informan

Dalam pengumpulan data kajian sejarah dan nilai budaya, istilah populasi tidak menjadi hal yang sangat prioritas dalam menentukan keluaran hasil penelitiannya, karena kajian tersebut tidak akan mengeneralisasi hasil penelitian. Dengan kata lain, kajian tersebut memiliki asumsi bahwa konteks/substansi lebih prioritas dibandingkan dengan jumlah/populasi. Oleh karena itu, kajian



ini tidak akan menghitung proporsi sampel yang dipandang lebih representatif. Tujuan penentuan sampel tidak untuk mendapatkan kesamaan data yang dapat digeneralisasi, akan tetapi untuk menghasilkan keunikan-keunikan. Sampel pada kajian ini bersumber dari peristiwa yang telah terjadi, situasi, dan manusia yang hidup di dalamnya. Dengan kata lain sampel adalah sumber informasi data itu sendiri.

Sampel pada kajian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* atau dikenal dengan sampel yang bertujuan. Teknik penentuan sampel pada kajian ini mengadopsi dari Frey (Endraswara, 2006:206) yang mengibaratkan seperti bola salju (*snow ball sampling*) yang menggelinding dan mengalir dalam menentukan subjek penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan jaringan, yakni berdasarkan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintahan, teknokrat dan masyarakat dengan organisasi yang ada di dalamnya. Sumber data utama yang diambil dalam kajian ini adalah kata-kata, ritual dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti buku sejarah, dokumen penelitian sejarah dan nilai budaya terdahulu, laporan tahunan instansi pemerintahan, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara berbeda dengan percakapan atau diskusi sehari-hari. Wawancara adalah “percakapan yang memiliki tujuan”. Wawancara sebagai wahana yang strategis dalam pengambilan data yang memerlukan kejelian dan teknik-teknik tertentu. Tujuan utama wawancara antara lain: (1) untuk menggali pemikiran konstruktif seorang informan, yang menyangkut peristiwa, organisasi, perasaan, perhatian dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas sejarah dan nilai budaya; (2) untuk mengulang peristiwa informan di masa lampau; (3) untuk mengungkap proyeksi pemikiran informan tentang kemungkinan keberlanjutan budaya di masa mendatang.

Macam-macam wawancara cukup banyak tergantung dari teknik dan tujuan penelitiannya. Teknik wawancara yang digunakan dalam kajian ini adalah



wawancara tak berstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara tak berstruktur membuat wawancara tidak terkesan kaku karena mengasumsikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh informan adalah sangat penting. Sementara itu, wawancara mendalam ini bertujuan untuk mengungkap tokoh-tokoh, atau simbol sejarah dan budaya yang memiliki nilai strategis. Wawancara ini dilakukan dengan santai, informal dan masing-masing pihak tidak ada beban dalam mengungkapkan pendapat.

Wawancara mendalam pada kajian ini mengadopsi dari Bogdan dan Taylor (Endraswara, 2006:214) yang mengungkapkan bahwa wawancara ini membentuk dua macam pertanyaan, yaitu *pertanyaan substantif* dan *pertanyaan teortik*. *Pertanyaan Substantif* berupa persoalan khas yang terkait dengan ritual dalam serangkaian sejarah dan nilai budaya, seperti kendurian, sedekah bumi, makan bajambang (padang), dan ritual lainnya. Sementara itu, *pertanyaan teoritik* berkaitan dengan makna, nilai dan fungsi seperti, nilai yang dilestarikan dari makan bajambang, kendurian, sedekah bumi, sekatenan dan lain-lain.

Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk mengkaji secara empiris dari data yang telah dikumpulkan di lapangan . Data sekunder yang dicari, diantaranya adalah :

- a. Laporan tahunan Balai dan rencana kerjanya (tahunan ataupun 5 tahunan,
- b. Laporan statistik sosial/budaya (atau sejenisnya),
- c. Peta sejarah dan nilai budaya yang tersedia,
- d. Laporan/publikasi lain yang relevan dengan isi bahan laporan
- e. Materi Teknis RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kota,
- f. Peraturan-peraturan daerah yang terkait tentang pelestarian dan pemanfaatan obyek sejarah dan cagar budaya



BAB 4

KEBIJAKAN PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

4.1. Peta Sejarah dan Peta Nilai Budaya

Berbagai penelitian dan laporan telah menunjukkan bahwa keterikatan seseorang ataupun kelompok masyarakat pada nilai-nilai sejarah dan nilai budaya lokal ataupun daerah asal dapat ditumbuhkembangkan melalui proses pengayaan pembentukan *cognitive space*, *affective space*, dan *connative space*. Upaya sistematis dan intensif secara berjenjang sejak dini (dari tumbuh kembang karakter seseorang atau kelompok masyarakat) dapat membentuk satu tipikal *bounding space* atau *bounding place* atau sebutan lain sebagai *space/place attachment* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai Rasa Cinta Tanah Air. Secara skematis proses pembentukan Rasa Cinta Tanah Air terlihat pada gambar 9.

Upaya terus menerus pembentukan ‘*space value*’ yang secara gradual meningkat intensitasnya berpotensi membangun *bounding space/place* menjadi rasa “Cinta Tanah Air” dan merupakan bagian dari nilai budaya. Proses pembentukan kognitif yang dibangun dari eksistensi sejarah setempat berikut nilai-nilainya juga dapat membangun karakter kognitif tertentu. Hal ini juga diungkapkan dalam disertasi Agi Ginanjar pada Program Studi Arkeologi UI pada tahun 2014 berjudul “Komunikasi Cagar Budaya pada Remaja: Studi Eksperimen”. Dengan demikian seyogyanya kebijakan pemetaan sejarah dan nilai budaya menjadi bernilai



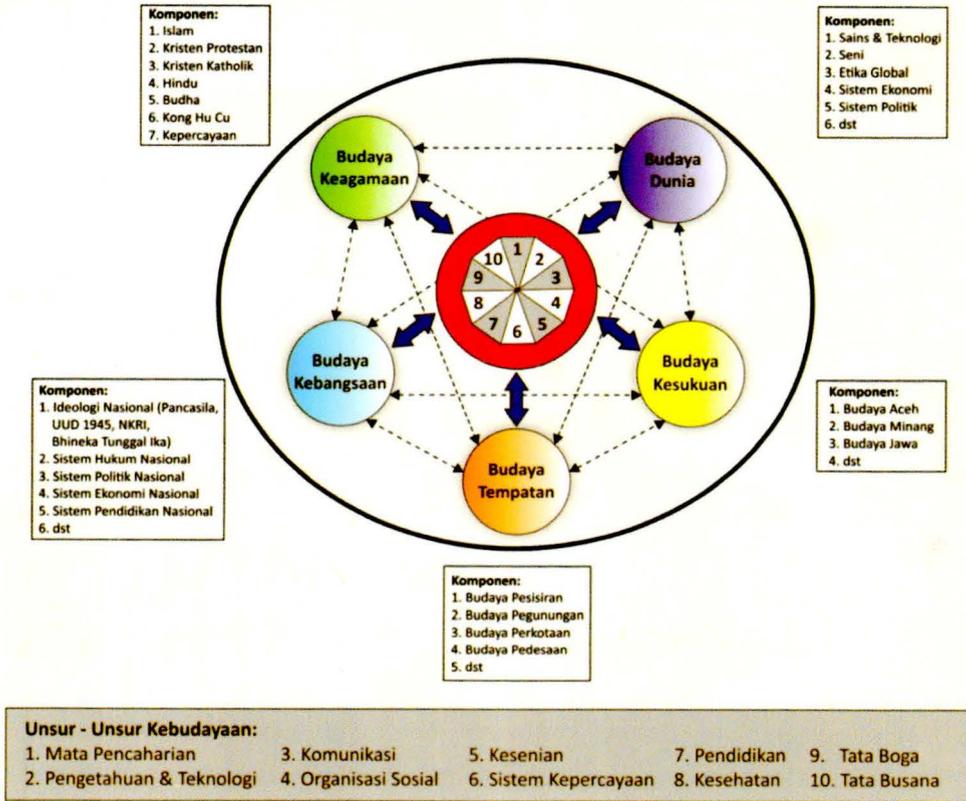
berubah menjadi Direktorat Sejarah. Pada tahun 2007 dibentuk Direktorat Geografi Sejarah untuk mewujudkan pemahaman geografi kesejarahan dalam dimensi ruang dan waktu, baik masa lalu, kini dan masa datang dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional dan integrasi bangsa.

Sampai dengan tergabungnya Direktorat Jenderal Budaya ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional, niat tersebut di atas masih tetap relevan dalam Rencana Strategis Kementerian tahun 2010-2014. Konsep tersebut diperkuat dengan mengintegrasikan dalam proses pendidikan. Proses pengintegrasian budaya dalam bidang pendidikan dilakukan dengan peningkatan pelayanan budaya melalui:

- a. Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan;
- b. Pembinaan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;
- c. Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia;
- d. Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/ PPKN;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Lebih lanjut, skema proses pengintegrasian budaya ini digambarkan dalam gambar 10.





Gambar 10 Skema Proses Pengintegrasian Budaya

Sumber: Renstra Dirjen Kebudayaan Kemendikbud 2010-2014

Gambar di atas pada dasarnya menjelaskan keseluruhan proses sistem budaya dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Dengan kata lain proses ini juga menjelaskan proses membangun jati diri dan karakter bangsa. Dengan demikian *outcome* dari upaya pemetaan sejarah dan nilai budayapun dapat dikategorikan sebagai mewujudkan kemajuan peradaban bangsa dalam pembangunan budaya nasional.



Lebih dari itu, konsep proses sistem budaya ini menjadi bagian inti dari pembangunan manusia Indonesia. Bahkan disebutkan bahwa membangun karakter bangsa menjadi pengarusutamaan (*main streaming*) pembangunan nasional. Dengan kata lain, setiap upaya pembangunan nasional harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampak terhadap karakter bangsa. Oleh karenanya pembangunan jati diri dan karakter bangsa menjadi vital bagi proses ataupun hasil pembangunan budaya nasional. Jika karakteristik bangsa ini baik atau positif maka dengan sendirinya kehidupan sehari-hari bangsa ini akan menjadi lebih kokoh namun juga sekaligus nyaman.

Lebih jauh, nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Sedangkan sejarah merupakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Sejarah dapat memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa untuk melangkah dari kehidupan masa kini ke masa yang akan datang. Untuk itu pembinaan sejarah dan nilai budaya menjadi sangat penting. Apalagi jika disadari tantangan sebagai berikut:

- 1) Kecenderungan krisis jati diri (identitas) nasional
- 2) Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila
- 3) Merosotnya keadaban dan krisis sosial (meningkatnya kekerasan, KKN, dikriminatif, vandalistik, mentalitas instan, manipulatif, primordialistik, konsumtif)
- 4) Rendahnya toleransi antarumat beragama dan berkepercayaan
- 5) Rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya
- 6) Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi lokal
- 7) Rendahnya daya juang dan etos kerja



- 8) Terbatasnya informasi dan publikasi terhadap nilai-nilai kesejarahan di berbagai daerah, dan pemanfaatannya dalam pengembangan ketahanan budaya dan pembangunan jatidiri dan karakter bangsa
- 9) Terbatasnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya nasional
- 10) Terbatasnya media dan ruang apresiasi dalam mendukung peningkatan apresiasi nilai-nilai sejarah dan budaya nasional
- 11) Arus globalisasi dan menguatnya dominasi nilai-nilai global/ universal yang dapat melunturkan nilai-nilai kearifan lokal dan kohesi masyarakat.

Dengan demikian seyogyanya uraian di atas menunjukkan nilai penting atau vitalnya urusan sejarah dan nilai budaya menjadi outcome pembangunan nasional. Dalam konteks kelembagaan, urusan sejarah dan nilai budaya *sekurang-kurangnya* ada pada jajaran Direktorat Jenderal. Namun, posisinya pada eselon II dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merefleksikan adanya pengurangan nilai atau reduksi ontologi atas pemaknaan ataupun fungsi serta peran urusan sejarah dan nilai budaya dalam kerangka pembangunan (budaya) nasional (lihat Gambar 11 tentang Struktur Organisasi Dirjen Budaya). Atau setidaknya dari sisi fokus penyelenggaraan kegiatan atau output Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya dalam Dirjen Kebudayaan Kemendikbud secara proposional harus lebih menonjol. Dan hal ini direfleksikan dari indikasi alokasi anggaran, termasuk untuk kegiatan pemetaan sejarah dan nilai budaya.





Gambar 11. Struktur Organisasi Dirjen Budaya Kemendikbud

Sumber: Renstra Dirjen Kebudayaan Kemendikbud 2010-2014

Dalam Permen no. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pasal 625 disebut bahwa tugas dan fungsi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya juga telah menetapkan fungsi berkaitan dengan urusan pemetaan sejarah dan nilai budaya seperti berikut ini:

1. perumusan kebijakan di bidang sejarah dan nilai budaya;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sejarah, pemetaan, verifikasi dan perumusan nilai serta dokumentasi dan publikasi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan nilai budaya;



4. perumusan nilai budaya, sejarah, tradisi, seni, film, kepercayaan, dan cagar budaya;
5. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sejarah, pemetaan, verifikasi dan perumusan nilai serta dokumentasi dan publikasi;
6. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah dan nilai budaya;
7. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan nilai budaya; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Budaya ditetapkan bahwa pemetaan sejarah dan nilai budaya ada dalam Tujuan Strategis nomor 4 (empat) sebagai turunan dari Misi keempat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 1. Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya dalam Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIUKAAN
4	Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	4.1. Pengembangan basis data dan akses informasi terhadap kekayaan nilai sejarah dan budaya bangsa	a). Penguatan basis data, sumber informasi dan referensi tentang sejarah dan nilai budaya. b). peningkatan pengembangan kajian sejarah dan nilai budaya dalam mendukung pembentukan jati diri dan pembangunan karakter bangsa.
		4.2. Pengembangan kepedulian (awareness) dan apresiasi terhadap kekayaan nilai sejarah, budaya bangsa Indonesia	a). Peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai sejarah dan nilai budaya. b). Peningkatan pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan nilai budaya

Sumber: Renstra Dirjen Kebudayaan Kemendikbud 2010-2014



Untuk penegasan pentingnya kegiatan pemetaan sejarah dan nilai budaya perlu ditetapkan dalam prioritas program sebagai terjemahan dari arah kebijakan. Penetapan ini penting untuk tidak hanya diposisikan sebagai upaya inventarisasi dan dokumentasi saja. Oleh karena itu penetapan tujuan strategis ini juga perlu diperkuat dengan pernyataan (*statement*) yang menjelaskan peran aktif membangun kekuatan budaya bagi pembangunan nasional.

Sampai saat ini secara lebih rinci Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan dan kebijakan pengembangan sejarah dan nilai budaya;
2. Pembuatan buku sejarah dan nilai budaya;
3. Apresiasi sejarah dan nilai budaya;
4. Penyusunan buku hasil verifikasi dan perumusan nilai;
5. Pendokumentasian sejarah dan nilai budaya;
6. Fasilitasi even sejarah dan nilai budaya;
7. Bimbingan teknis;
8. Penyusunan atlas sejarah;
9. Pemantauan dan evaluasi;
10. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sejarah dan nilai budaya.

Selanjutnya dalam kerangka anggaran upaya untuk mencapai tujuan strategis di atas ditunjukkan dengan alokasi anggaran tahun 2010-2014 sebagai berikut:



Tabel 2. Indikasi Anggaran Untuk Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya Tahun Anggaran 2010-2014

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RP)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
10.4	PENGEMBANGAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	IKK 10.4.1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pengembangan Sejarah Dan Nilai Budaya	-	-	5	3	2	-	-	2.500.000	950	700
IKK 10.4.2		Jumlah Buku Sejarah Dan Nilai Budaya Yang Ditulis	-	-	6	7	7	-	-	14.500.000	6.401.114	7.000.000	
IKK 10.4.3		Jumlah Buku Hasil Verifikasi Nilai Budaya	-	-	-	2	2	-	-	2.000.000	2.000.000		
IKK 10.4.4		Jumlah Atlas Sejarah Dan Nilai Budaya Yang Disusun	-	-	-	1	1	-	-	1.576.965	1.750.000		
IKK 10.4.5		Jumlah Dokumen Sumber Sejarah Dan Nilai Budaya Yang Terdokumentasi	-	-	-	7	7	-	-	7.474.046	8.000.000		
IKK 10.4.6		Jumlah Apresiasi Masyarakat Terhadap Sejarah Dan Nilai Budaya	-	-	16	64,4	65	-	-	20.500.000	44.600.000	47.000.000	
IKK 10.4.7		Jumlah Fasilitasi Even Sejarah Dan Nilai Budaya	-	-	6	44	40	-	-	7.000.000	13.730.629	12.000.000	
IKK 10.4.8		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sejarah Dan Nilai Budaya	-	-	-	96	96	-	-	1.110.000	1.200.000		
IKK 10.4.9		Jumlah Rumah Budaya Nusantara Yang Difasilitasi	-	-	-	33	33	-	-	66.000.000	66.000.000		
IKK 10.4.10		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	-	-	7	7	7	-	-	1.500.000	927.462	1.000.000	

Sumber: Renstra Dirjen Kebudayaan Kemendikbud 2010-2014

Penjabaran kebijakan, lembaga, dan penyelenggaraan pemetaan sejarah dan nilai budaya di atas menunjukkan masih belum berimbangnya antara tuntutan yang tinggi *outcome* berikut *output* bagi pengembangan sejarah dan nilai budaya bagi pencapaian pembangunan nasional, termasuk pembangunan budaya nasional dengan program dan uraian kegiatannya. Tingginya tuntutan *outcome* yang juga dapat memberikan dampak yang luas bahkan sangat mendasar dalam membangun karakter bangsa sebagai modal dasar pembangunan nasional masih diterjemahkan secara terbatas dalam prioritas program maupun kegiatannya. Jika mengacu pada tantangan dan harapan masyarakat tentunya lebih banyak prioritas program berikut kegiatannya yang secara terus menerus diperlukan. Diantara prioritas program yang dapat dikembangkan pada tahap pembangunan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi, apresiasi dan rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal melalui pendekatan geografi sejarah dan nilai budaya



2. Pemanfaatan bauran komunikasi (*mixed communication*) sebagai instrumen proses pembelajaran dan pembentukan jati diri dan karakter masyarakat
3. Dokumentasi audio-visual nilai sejarah dan nilai budaya sebagai *intellectual property* bangsa dan negara
4. Penyusunan pedoman penilaian sejarah dan nilai budaya sebagai asset negara



BAB 5

MANFAAT PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

5.1. Manfaat Ideal

Sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab 4 secara ideal manfaat pengembangan sejarah dan nilai budaya, termasuk dalam konteks kegiatan pemetaannya, adalah ikut mewujudkan jati diri dan karakter bangsa sebagai modal dasar pembangunan nasional. Dampak bagi pembangunan jati diri dan karakter bangsa ini tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan bangsa dalam hal meningkatkan kesadaran kedaulatan negara dan juga sampai pada kapasitas daya saing nasional, sebagaimana ditetapkan dalam cita-cita atau Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu menjadi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ketiga tahun 2015-2019 fokus pembangunan ada pada “ Memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan Iptek”. Fokus pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan bangsa dan nasional NKRI. Dengan kata lain, sikap pragmatis rasional yang berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu harus dihindari dan digantikan oleh kepentingan bangsa dan nasional tersebut. Disinilah relevansi membangun SDM berkualitas dalam



konteks membangun jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Sementara itu konsep yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2015-2019 yang tertuang dalam konsep Nawa Cita menyebutkan bahwa Visi dan Misinya sebagai berikut:

Visi : *Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*

Misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Visi dan Misi tersebut menunjukkan keinginan yang kuat untuk membangun jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang kukuh sesuai dengan budaya Indonesia. Bahkan kemudian ditegaskan sebagai pilar Jalan Perubahan untuk Rakyat Indonesia melalui Revolusi Mental yang terdiri dari tiga elemen dasar yaitu: emansipasi, kemandirian, dan kebhinekaan. Oleh karena dalam dua fokus



agenda prioritas pembangunan (nomor 8 dan 9) disebutkan untuk melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kedua agenda terakhir ini pada prinsipnya sejalan dengan apa yang harus dihadapi dalam konteks tantangan bagi pembangunan budaya nasional. Kedua agenda prioritas pembangunan yaitu nomor 8 dan 9 dalam konsep Nawa Cita terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Agenda Prioritas Nomor 8 dan 9

<p>Prioritas nomor 8</p> <p>Melakukan Revolusi Karakter Bangsa</p>	<p>Prioritas nomor 9</p> <p>Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun pendidikan kewarganegaraan • Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional • Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil • Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi • Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pendidikan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga • Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga • Membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial • Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal • Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajuan sebagai kekuatan budaya.

Sumber: Nawa Cita, 2014

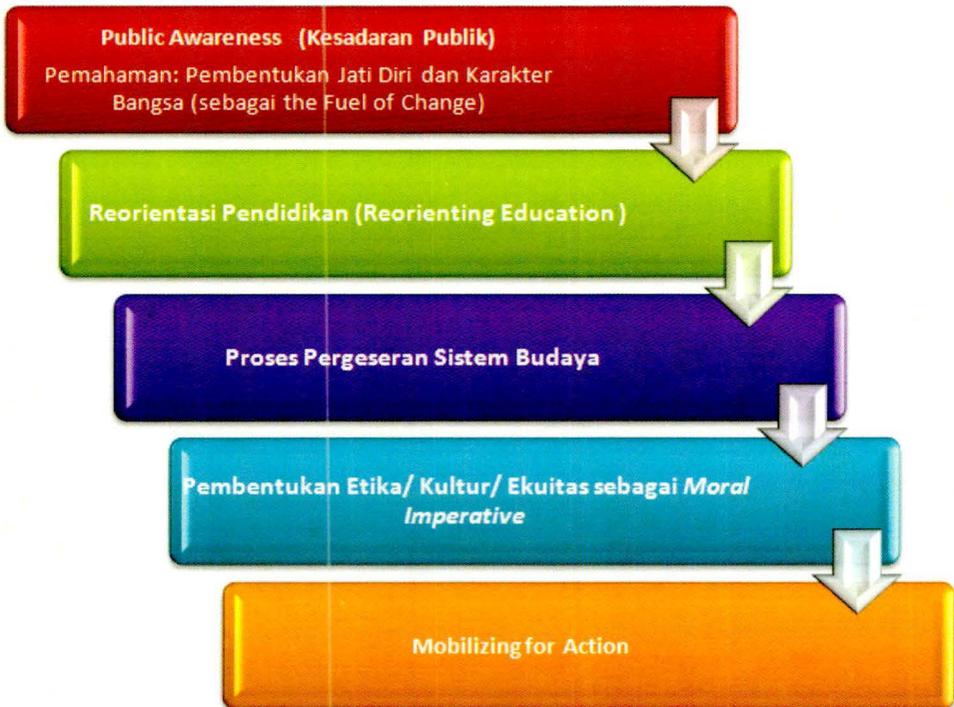
Catatan : Kalimat atau pernyataan yang ditulis dengan penebal artinya memiliki relevansi dan hubungan langsung dengan program pengembangan sejarah dan nilai budaya



Berdasarkan uraian di atas maka menjadi vital dan mendesak untuk meninggikan prioritas pengembangan sejarah dan nilai budaya, termasuk dalam kaitannya dengan program pemetaan sejarah dan nilai budaya.

5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari manfaat ideal di atas seharusnya memiliki satu alur rasionalisasi yang nyata di lapangan atau dalam masyarakat. Secara konseptual tahapan yang perlu dipahami untuk menjadi manfaat praktis dapat diadaptasi dari pemahaman yang dikembangkan oleh UNESCO berikut ini:



Gambar 12. Tahapan dari konsep Ideal menjadi terealisasi

Sumber: diadaptasi dari UNESCO, 1997

Dari tahapan di atas dapat dikatakan bahwa secara umum atau hasil observasi menunjukkan bahwa saat ini memang masih dalam tahapan memberikan “Kesadaran Publik” akan pentingnya pembentukan (kembali) jati diri dan karakter bangsa. Namun dalam tahapan inilah peran pengembangan sejarah dan nilai budaya, khususnya pemetaan sejarah dan nilai budaya menjadi sangat penting. Apalagi jika dikaitkan dengan pembentuk nilai-nilai budaya lokal dalam kerangka kebhinekaan melalui kegiatan pemetaan sejarah dan nilai budaya sehingga terbentuk kognisi yang semakin kuat melalui pendekatan pengembangan kognisi tempat (*space cognitive*) yang pada akhirnya juga membangun perilaku ruang (*Connative Space*) yang berciri jati diri dan karakter kebhinekaan tadi.

Tahap “kesadaran publik” (*Public Awareness*) mudah ditemui saat dilakukan pemeriksaan lapang di Padang, Ternate, dan Pontianak. Sebagian besar obyek bernilai sejarah dan budaya lebih ditempatkan sebagai tempat yang menarik untuk obyek wisata ketimbang sebagai situs atau tempat proses pembelajaran sosial-budaya, seperti yang sedang berlangsung di Kampung Adat minangkabau Nagari Sumpu Kecamatan Batipuh Selatan dan yang masih berlangsung di Cagar Budaya Surau Nagari Lubuk Bauk. Kedua contoh ini menunjukkan potensi untuk transformasi sosial-budaya menuju pada pembentukan jati diri dan karakter budaya lokal. Pemanfaatan pemetaan sejarah dan nilai budaya sebagai bagian dari proses peningkatan kesadaran publik selain sebagai bagian dari instrumen pendidikan masih dilakukan terbatas dan tidak terus menerus. Perhatian pemerintah daerah dalam menilai, memanfaatkan asset ini juga masih terbatas dan terindikasi masih belum dijadikan obyek pembangunan yang penting, serta masyarakatpun, setidak-tidaknya yang ada di sekitar situs kurang memberikan penghargaan yang tinggi. Kelemahan publik ini merefleksikan terlepasnya pemahaman pemerintah dan publik dari nilai penting bagi proses pembentukan jati diri dan karakter atau kepribadian budaya lokal. Secara teoritis dan dalam konteks proses merealisasi proses pembentukan jati diri dan karakter bangsa ini masih dalam tahap sebatas pengetahuan belum menjadi kesadaran apalagi menjadi inti nilai budaya.

Proses pembelajaran dari transformasi sosial – budaya di lokasi yang sama tradisi



Minangkabau namun dengan produk yang berbeda yakni produk makanan rendang. Keberadaan rendang ini tidak hanya dikenal pada tingkat lokal, namun juga tingkat nasional hingga internasional. Bahkan pada tahun 2011, rendang ini dinobatkan menjadi hidangan peringkat pertama dalam daftar *World 50 Most Delicious Foods* (50 Hidangan Terlezat di Dunia) yang digelar oleh CNN International. Jenis rendang yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau cukup beragam, seperti: rendang daging dengan berbagai variasinya, rendang belut, rendang telur, rendang paku, rendang cubadak, rendang udang, dan lain-lain. Masing-masing rendang biasa diidentikan dengan suatu daerah, misalnya rendang belut berasal dari Sumanik Kab. Tanah Datar.

Bagi masyarakat Minangkabau rendang lebih dari sekedar makanan, tetapi merupakan bagian dari kebudayaan (Hariadi, dkk - 2012). Dalam acara *baralek* (kenduri), acara adat, ataupun hari raya, rendang selalu harus tersedia diantara hidangan lainnya. Bahkan, di beberapa daerah rendang telah dijadikan simbol berhemat dengan cara membuat rendang dengan potongan daging besar, namun daging tersebut tidak boleh dimakan selagi makanan yang lainnya masih ada.

Sebagai suatu produk budaya, rendang mengandung serangkaian nilai budaya di dalamnya. Nilai tersebut terlihat dari proses pemilihan bahan yang baik untuk membuat rendang yang bisa menanamkan nilai ketelitian dalam melakukan aktivitas. Proses pembuatan rendang mencerminkan nilai kesabaran dalam menjalani kehidupan karena memasak menggunakan api kecil membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran. Proses mengaduk, mendorong dan menarik (*tulak raiah*) mencerminkan sifat keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai budaya tersebut masih dipertahankan dengan baik terutama di daerah yang masih kental dalam melaksanakan ritual dan tradisi adatnya. Namun, sekarang sudah mulai luntur nilainya berbarengan dengan makanan kekinian yang dapat dipelajari dari internet. Hal ini merefleksikan kelemahan pemerintah dan publik dalam mengapresiasi budaya sebagai aset terhadap tradisi lokal yang dapat dijadikan sebagai *brand* budaya lokal.



Sistem Pengairan Subak dan Tri Hita Karana di Bali; Contoh Dari Nilai ke Realisasi

Sistem Pengairan Subak di Bali telah berlangsung sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Sistem pengairan ini tidak hanya berfungsi menyediakan air bagi lahan persawahan tetapi juga berfungsi memelihara kelestarian ekosistem. Secara sistemik pengelolaan Sistem Pengairan Subak sekaligus membangun masyarakat agraris Bali menyatu dengan pusat komunitas Bale Banjar dan keberadaan candi-candi masyarakat di Bali. Kelestarian ekosistem ini didasari oleh nilai filosofis Tri Hita Karana dari Agama Hindu dan diwujudkan dalam bentuk hubungan serasi dan selaras antara manusia, alam dan Tuhan. Ketiga bentuk hubungan itu diyakini merupakan sistem keharmonisan hidup (lahir dan bathin) yang mendatangkan keselamatan dan kebaikan. Ketiga hubungan tersebut adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (*Palemahan*).

Pada Juni tahun 2012 Sistem Subak terdaftar sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO. Penetapan ini sedikitnya merupakan reaksi terhadap semakin berkurangnya wilayah Sistem Subak oleh desakan kegiatan turisme di Bali sehingga diperkirakan sejak tahun 1960an fungsi lahan persawahan telah beralih dengan Sistem Subak seluas 1000 hektar. Selain itu juga ada desakan sistem pengelolaan perairan oleh sistem irigasi modern yang dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui penetapan UNESCO inilah maka wilayah Sistem Subak telah ditentukan untuk dijadikan wilayah suaka budaya. Secara teknis, proses penetapan wilayah sistem Subak sebagai wilayah suaka ini merupakan bagian dari kerja pemetaan sejarah.

Dalam konteks perkembangan kehidupan dan keilmuan masa kini, konsep Tri Hita Karana merupakan satu bentuk pemikiran yang tergolong *post-modern*. Artinya konsep nilai konsep sistem Subak yang di dasari oleh nilai-nilai Tri Hita Karana ini tetap relevan dengan tuntutan kehidupan masa kini. Bahkan telah dijadikan sebagai acuan dasar bagi bangsa-bangsa di dunia untuk lebih mampu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pada sisi lain, dalam pertemuan APEC di Bali 2013 yang lalu Sekretaris Jenderal PBB melalui Jeffrey



Sach (peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi) memberikan apresiasi dengan menjadikan Tri Hita Karana sebagai dasar pemikiran pengembangan program UN-SDSN (United Nation – Sustainable Development Solution Network; Program PBB yang merupakan kelanjutan dari Program Millennium Development Goals/ MDG). Pada kesempatan itu, pemerintah Singapura mengakui telah mengadaptasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam membangun Singapura. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Konsep Sistem Subak dengan nilai-nilai dasar Tri Hita Karana telah diakui dan diterapkan sebagai konsep pemikiran sekaligus acuan etis untuk menggerakkan upaya pembangunan berkelanjutan di dunia.

Ilustrasi di atas menegaskan bahwa pemetaan sejarah dan nilai budaya tidak saja berhenti pada tingkat *public awareness*. Sistem Subak dengan Tri Hita Karannya telah terbukti menjadi nilai dasar dalam kehidupan masyarakat setempat yang mampu melestarikan ekosistemnya dan menciptakan kehidupan yang serasi dan harmonis antara manusia dengan alamnya melalui kesadaran keterikatannya dengan nilai Ketuhanan. Proses pembelajaran hingga terbangunnya kesepakatan nilai etis atau budaya dalam membangun kehidupan di wilayah Sistem Subak ini kemudian menjadi contoh nyata dalam mendorong masyarakat dunia membangun dan memobilisasi gerakan sejenis ke bagian wilayah Indonesia dan bahkan secara global.



BAB 6

PROSES PENYUSUNAN PEMETAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

6.1. Teknologi Pemetaan

Teknologi pemetaan saat ini telah berkembang pesat dari era konvensional menuju era digital (komputerisasi). Alih teknologi analog (konvensional) ke sistem komputerisasi (digital) dalam hal pemetaan ini dimulai pada awal 80-an dengan suatu sistem digital yang lebih disebut dengan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Berkaitan dengan pemetaan sejarah dan nilai budaya, ada dua elemen penting yang menjadi dasar dari sejarah ini yaitu; ruang dan waktu. Ruang berkaitan erat dengan kondisi sekitar obyek, dapat berupa suatu satuan batasan administrasi maupun batasan abstrak di bumi ini. Sementara waktu sangat berkaitan erat dengan deskripsi obyek yang dipetakan. Kedua elemen ini secara kebetulan juga merupakan elemen dasar dari SIG, yang mampu memadukan informasi ruang yang berkaitan dengan posisi dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan tempat, serta dimensi waktu yang berkaitan erat dengan atribut/informasi/deskripsi detil dari setiap obyek (obyek sejarah dan nilai budaya)

Data dan informasi geografis yang dimiliki oleh SIG tersimpan dalam bentuk digital dalam komputer dengan kapasitas yang sangat besar. Dengan kemajuan teknologi komputer, media penyimpan data digital dengan kapasitas besar banyak tersedia dengan harga yang makin lama makin murah.



Sistem ini makin lama makin sempurna dan canggih sehingga SIG tidak hanya digunakan oleh mereka yang berkecimpung di bidang ilmu kebumih sains saja, tetapi SIG sudah banyak dibutuhkan oleh para pelaksana dan praktisi dalam berbagai bidang.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti: lokasi, kondisi, trend, pola, dan pemodelan/prediksi. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila data geografis dan sumberdaya manusia yang mengoperasikannya belum tersedia. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, SIG hanyalah sebuah 'alat' yang mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan sumberdaya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir sangat berperan dalam keberhasilan SIG.

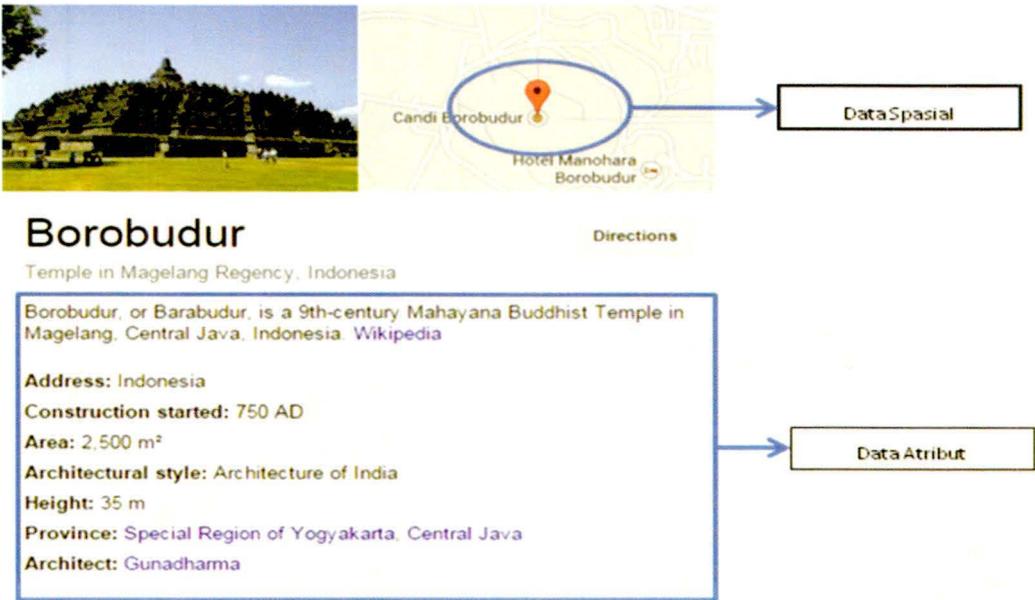
Data yang dikelola SIG terdiri dari dua jenis, yang pertama, *data spasial* adalah data yang mempunyai dimensi ruang (space) yang disajikan dalam suatu peta. Data ini merupakan data ruang muka bumi yang apabila disajikan pada peta dapat menunjukkan posisi dan menerangkan tentang lokasi geografis, misalnya: lokasi situs bersejarah, kawasan kerajaan dan sebagainya. Dalam penyajiannya, setiap data spasial tersebut disertai dengan label sebagai keterangan dari apa yang disajikan. Selain menunjukkan posisi, data ini juga menggambarkan obyek dan fenomena geografisnya. Obyek mengacu pada lokasi di permukaan bumi dengan menggunakan sistem koordinat (x dan y). Sedangkan fenomena geografis dapat berupa konsep fenomenologis, seperti : kota, sungai, dataran rendah/tinggi, bentuk serta struktur tanah dan sebagainya.

Jenis data kedua adalah *data non spasial*, disebut juga *data atribut*, merupakan data deskriptif yaitu data kualitatif (nama, jenis, tipe, dan lainnya) atau data kuantitatif (angka satuan/besaran/ jumlah, tingkatan, kelas, interval, dan lainnya) yang mempunyai hubungan satu-satu dengan data grafisnya. Data non spasial



dapat diperoleh melalui data statistik maupun keterangan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan informasi dari data spasial.

Dalam input data, data spasial dan data atribut harus dihubungkan secara benar (atribut harus terkait secara logis dengan obyek spasial yang dijelaskan). Bentuk data non spasial fungsinya tidak menunjukkan lokasi suatu obyek, tetapi memberikan informasi deskriptif dan menjelaskan identitas suatu obyek, misalnya: nama situs, waktu/masa berdiri, kebudayaan yang mempengaruhi dan sebagainya. Lihat gambar 6.2.



Gambar 13. Contoh Data Spasial dan Non Spasial

Teknologi yang digunakan dalam SIG dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan prosesnya, yaitu:



➤ Teknologi Pengambilan dan Pemasukan Data

Teknologi ini terdiri dari alat-alat yang digunakan oleh surveyor dan operator SIG dalam proses pengambilan data di lapangan ataupun memasukkan data spasial kedalam basisdata geospasial. Teknologi *Global Positioning Systems* (GPS) digunakan oleh surveyor jika pengambilan data dilakukan secara langsung dilapangan dan menghasilkan data berupa titik koordinat dan jalur perjalanan yang kemudian dapat ditampilkan dalam peta.

Bila surveyor tidak dapat mencapai lokasi yang harus di survai, maka teknologi yang dapat diandalkan adalah penginderaan jauh dimana obyek yang akan dipetakan dapat diindera menggunakan teknologi citra satelit ataupun foto udara. Teknologi penginderaan jauh juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi masa lalu dengan memanfaatkan data akuisisi citra pada masa lampau (terbatas hingga waktu dimulainya satelit beroperasi).

Definisi dari penginderaan jauh adalah:

'Pengambilan atau pengukuran data /informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, obyek atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi'

Seperti halnya dengan foto yang dihasilkan oleh kamera biasa, foto/citra satelit juga memberikan gambaran permukaan bumi yang dihasilkan dari sensor satelit yang mendasarkan pada perekaman dengan menggunakan spektrum elektromagnetik yang lebih luas daripada spektrum yang digunakan untuk keperluan fotografi darat (*ground photography*). Karena sifat inilah maka data foto/citra satelit dapat diekstrak menjadi data turunan yang dapat dimanfaatkan luas untuk berbagai keperluan aplikasi.

Variasi kedetilan obyek yang digambarkan dalam citra/foto satelit disebut dengan resolusi spasial atau lebih tepat ukuran obyek di permukaan bumi terkecil yang dapat direkam oleh sensor satelit. Ukuran ini sering disebut dengan piksel sebagai bahasa aplikasi dijitalnya.

Perkembangan teknologi penginderaan jauh ini juga sangat pesat seperti halnya dengan perkembangan perangkat lunak SIG atau basis dijital



lainnya. Jenis kedetilan dari citra satelit yang bervariasi saat ini tentu saja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan studi sejarah tergantung pada unit interpretasi yang digunakan.

Sebagai gambaran contoh dari data ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Contoh Citra Satelit yang Umum Digunakan dalam Pemetaan

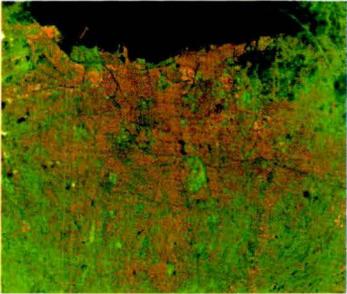
Contoh Citra	Penjelasan
	<p>Citra disamping adalah citra Landsat 8 OLI, citra ini adalah citra dari satelit yang dioperasikan oleh NASA dengan resolusi 30m dan 15m. Ekstraksi informasi dari citra ini adalah informasi penutup dan penggunaan lahan, informasi ekosistem, informasi kondisi geomorfologis, dan beberapa turunan lainnya yang dilakukan dengan serangkaian operasi pengolahan citra.</p>
	<p>Citra Quick Bird, merupakan citra satelit yang dikelola oleh pihak swasta. Citra ini memiliki resolusi spasial yang sangat tinggi yaitu 1,4m dan 60cm. Pada studi-studi sejarah dan arkeologi, citra ini mampu memberikan informasi detil mengenai kondisi suatu situs arkeologi dan elemen-elemen sejarah lainnya.</p>





Foto udara menggunakan pesawat udara nir awak (PUNA) merupakan teknologi terkini yang sedang berkembang. Resolusi citra foto udara yang dihasilkan oleh PUNA sangat bervariasi tergantung tinggi terbang dari wahananya. Semakin rendah terbangnya resolusi semakin tinggi dan sebaliknya semakin tinggi terbangnya resolusi semakin rendah. Kelebihan PUNA yang dapat terbang rendah dibawah awan dapat menghasilkan citra detil yang tidak tertutup awan.

Selain memanfaatkan data lapangan menggunakan GPS dan citra satelit atau foto udara, proses memasukkan data spasial ke dalam format SIG dapat pula menggunakan fasilitas pemetaan berbasis internet (*internet mapping*). Salah satu aplikasi pemetaan berbasis internet yang sifatnya terbuka penggunaannya adalah OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), dimana metode pemetaan yang diadopsi adalah pemetaan kolaboratif berbasis komunitas. Dalam aplikasi OpenStreetMap, pengguna yang sudah terdaftar dapat melakukan proses memasukkan data berupa data spasial jaringan jalan, jaringan sungai, dan titik obyek penting. Data yang sudah tersimpan dalam *server* OpenStreetMap bersifat terbuka dan setiap pengguna memiliki kemampuan untuk menambah dan mengedit data yang ada.

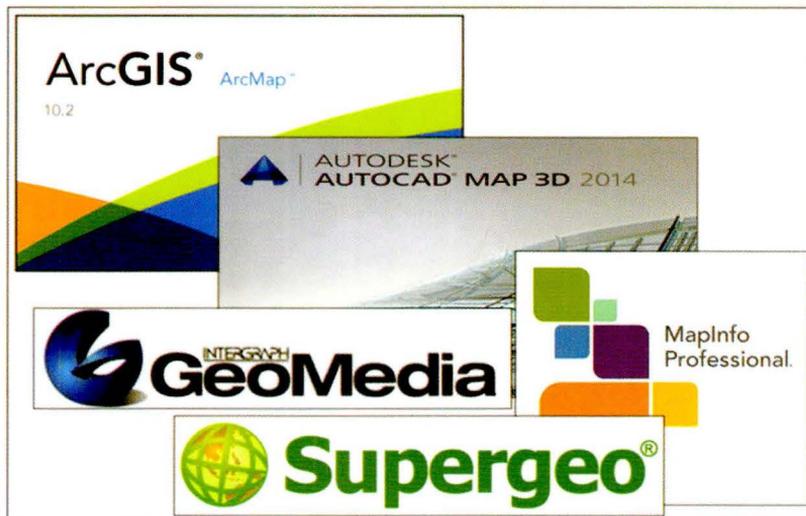
➤ Teknologi Pengolahan Data

Teknologi pengolahan data meliputi penggunaan perangkat lunak SIG dan perangkat keras komputer yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisa data spasial. Teknologi ini merupakan inti dari SIG dimana operator SIG dapat mengolah data lapangan atau data masukan menjadi informasi melalui proses simbolisasi dan analisis keruangan sehingga dapat menghasilkan informasi dalam bentuk peta bagi penggunaanya.



Perangkat lunak SIG terbagi menjadi dua kategori berdasarkan statusnya, yaitu:

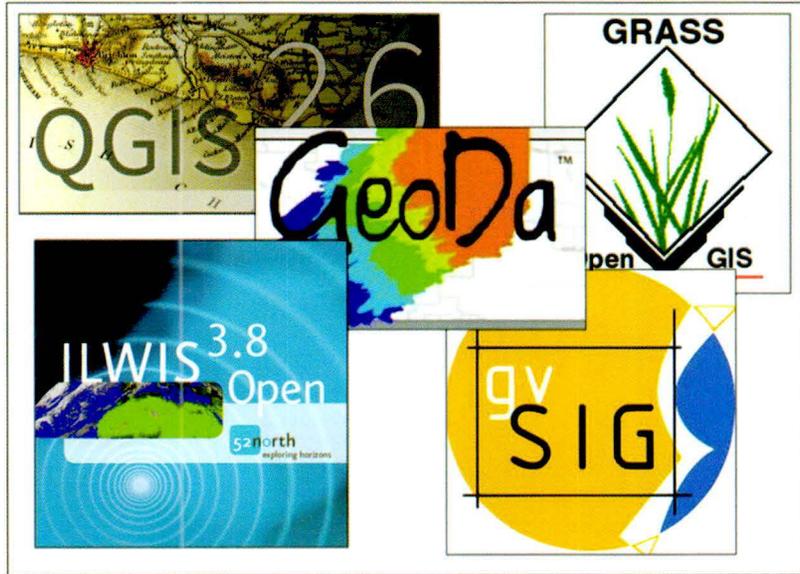
1. Perangkat lunak *proprietary*: Yaitu perangkat lunak SIG berbayar dimana pengguna harus membeli lisensi penggunaan dari perangkat lunak SIG untuk dapat menggunakannya dan membuat publikasi.



Gambar 14. Contoh Perangkat Lunak Proprietary

2. Perangkat lunak *open source*, yaitu perangkat lunak SIG yang bersifat terbuka dan gratis, penggunanya dapat mengunduh perangkat lunaknya melalui internet dan tidak perlu membayar biaya lisensi. Perangkat lunak *open source* juga membiarkan sistem pemrogramannya terbuka sehingga pengguna dapat memodifikasi perangkat lunaknya sesuai kebutuhan mereka.





Gambar 15. Contoh Perangkat Lunak Open Source

➤ Teknologi Publikasi Informasi

Teknologi publikasi pemetaan dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu cetak dan non cetak. Untuk teknologi cetak, yang dibutuhkan adalah alat cetak (*printer*) yang memiliki resolusi warna yang mendekati dengan resolusi yang ada pada layar monitor. Sedangkan untuk teknologi non cetak pada umumnya mengarah kepada teknologi pemetaan berbasis *web* dimana informasi yang didapat dipublikasikan melalui sebuah *web* yang interaktif.

Setiap fenomena sejarah dan budaya yang terjadi di permukaan bumi dapat digambarkan dengan menggunakan SIG sehingga dapat membantu sejarawan dan budayawan menjelaskan proses yang terjadi pada masa lalu dan menghasilkan budaya yang telah menghilang dan yang masih ada hingga masa kini.

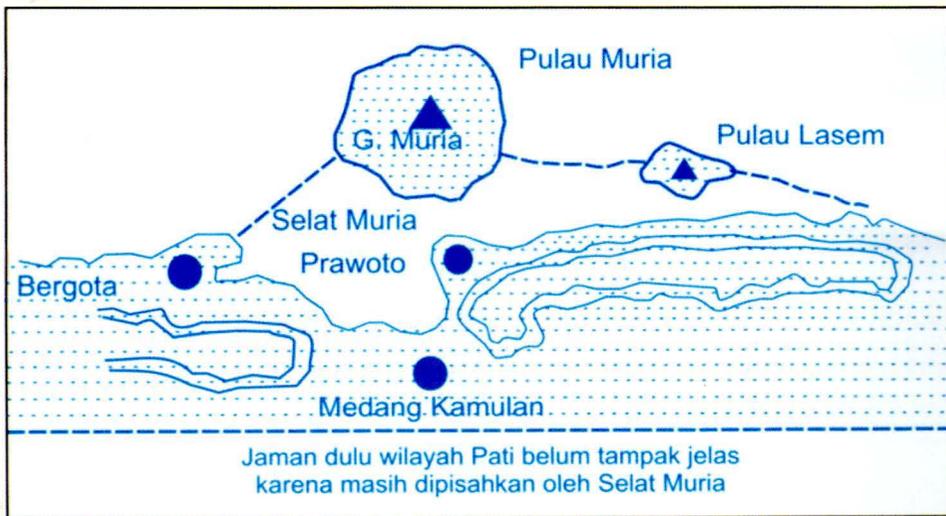


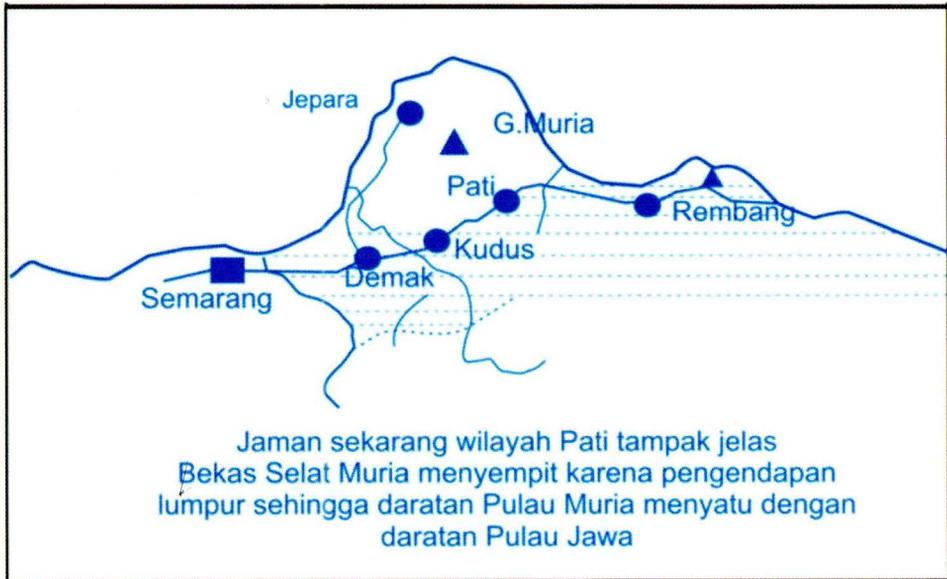
6.2. Metode Pemetaan Sejarah

6.2.1. Pemilihan Topik

Topik merujuk pada fenomena sejarah yang akan dipetakan. Setelah topik yang akan dipetakan ditentukan, dirumuskan rencana kerja untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Lingkungan fisik yang selalu berubah sepanjang waktu seperti: perubahan garis pantai, sejarah geologis, dan perubahan sungai purba merupakan fenomena sejarah yang dapat menjelaskan tentang sejarah terbentuknya suatu wilayah. Selain dari lingkungan fisik yang berubah, fenomena kehidupan manusia yang tinggal dalam suatu wilayah juga dapat menceritakan sebuah fakta sejarah, seperti: perpindahan penduduk, situs sejarah, perkembangan kota, dan lain-lain. Gambar 16 menggambarkan perubahan wilayah Pati yang dahulunya dipisahkan oleh Selat Muria yang kemudian semakin menghilang akibat dari adanya pengendapan dan pendangkalan kawasan perairan Selat Muria sehingga membentuk wilayah Pati seperti sekarang.





Gambar 16. Perubahan Lingkungan Fisik Wilayah Pati

6.2.2. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber sejarah dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti: kantor-kantor arsip yang dikelola oleh pemerintah, pribadi (arsip para kyai, mantan lurah, juru kunci, dan lain lain.) atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya; arsip keraton, arsip pesantren, arsip gereja, dan museum.

Sumber sejarah dan budaya terbagi atas data tertulis dan lisan. Sumber tertulis dapat diperoleh dari perpustakaan dalam bentuk buku, dokumen, surat kabar dan sebagainya sedangkan sumber lisan dapat diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dengan maksud untuk mengungkap peristiwa masa lalu yang dialami, dilihat dan didengar oleh informan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, sumber sejarah dapat juga menggunakan media audio visual.



6.2.3. Pemetaan

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan, proses selanjutnya adalah memetakan fenomena-fenomena sejarah telah direncanakan seperti: lokasi situs pra sejarah, bangunan-bangunan bersejarah, jalur perjalanan gerilya, dan lain-lain.

Proses pemetaan bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan pemetaan langsung di lapangan dengan menggunakan GPS, sketsa, dan alat ukur lainnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. GPS memberikan data mengenai lokasi absolut dari sebuah lokasi dalam bentuk titik koordinat sehingga dapat dengan mudah dipetakan. Selain data berupa titik, GPS juga dapat digunakan untuk memetakan jalur perjalanan yang dapat merepresentasikan jalur perjalanan masa lalu yang sebelumnya didapat dari literatur atau referensi lainnya dengan menggunakan fasilitas *tracking* yang ada pada GPS.

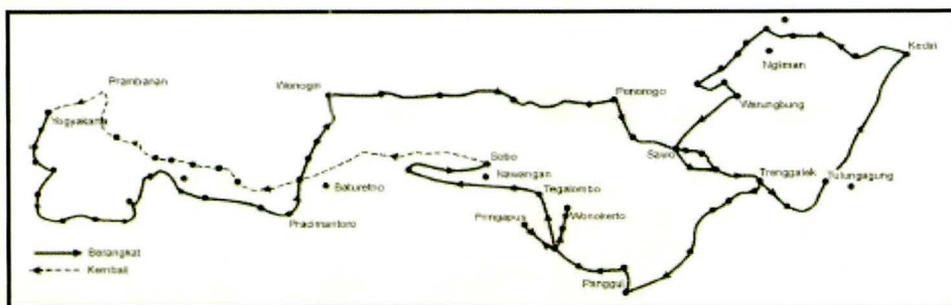
Cara yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan model prediksi. Pada metode ini operator SIG tidak secara langsung mendatangi lapangan, akan tetapi data didapat dari citra satelit atau foto udara yang menggambarkan wilayah masa lalu. Dengan menggabungkan data penginderaan jauh dengan literatur atau keterangan dari masyarakat setempat, operator SIG dapat dengan langsung menggambarkan pada peta dengan menggunakan simbol-simbol.

Tingkat ketelitian data dan visualisasi peta sejarah sangatlah bervariasi mulai dari skala kecil (umum) hingga skala besar (detil). Variasi dalam skala ditentukan dari fenomena atau obyek yang akan dipetakan. Misalnya untuk peta kawasan situs bersejarah diperlukan pemetaan dengan skala besar untuk menggambarkan obyek-obyek yang tersebar di kawasan tersebut, sedangkan untuk pemetaan jalur perjalanan gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman diperlukan pemetaan dengan skala kecil karena cakupan wilayah yang tergambarkan sangat luas dengan tarikan garis yang menghubungkan kota satu dengan kota yang lain. (Gambar 17 dan 18)





Gambar 17. Peta Situs Sejarah Skala Besar



Sumber: Atlas Sejarah, PT Pembina Peraga, 1994, hlm.41
Gb.3.10 Rute genjnya Pauglima Besar Jenderal Soedirman

Gambar 18. Peta Kejadian Sejarah Skala Kecil



6.2.4. Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah kritik data atau verifikasi yang meliputi verifikasi otentisitas dan kredibilitas.

- I. Otentisitas data tertulis diarahkan untuk menguji keaslian data. Untuk menguji hal tersebut diajukanlah pertanyaan berikut:
 - 1) Kapan : menerangkan waktu suatu data peristiwa diambil;
 - 2) Dimana : menerangkan ruang atau tempat berlangsungnya gejala suatu data yang diambil;
 - 3) Siapa : menerangkan individu atau instansi/ lembaga pembuat peta;
 - 4) Jenis Media : menerangkan metode pemetaan yang digunakan termasuk dalam analisis data.
- II. Kredibilitas digunakan untuk menilai kesahihan informasi atau sumber sejarah (lisan).

6.2.5. Interpretasi

Setelah mengalami proses verifikasi dilanjutkan dengan proses interpretasi atau penafsiran yang meliputi dua kegiatan yaitu analisis dan sintesis. Analisis secara harfiah berarti menguraikan data menurut komponen-komponennya. Misalnya, Peristiwa Pemberontakan buruh pabrik gula dengan ditemukannya informasi tentang daftar nama pekerja. Sintesis yang berarti menyatukan menghubungkan data sehingga memiliki keterkaitan dan makna. Contoh data tentang pembunuhan, pertempuran, orang-orang mengungsi, penurunan bendera bisa kita tafsirkan sebagai fakta bahwa di wilayah tersebut benar telah terjadi revolusi.



6.3. Metode Pemetaan Nilai Budaya

6.3.1. Pemilihan Topik

Topik merujuk pada unsur kebudayaan yang akan dipetakan. Setelah topik yang akan dipetakan ditentukan, dirumuskan rencana kerja untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Unsur kebudayaan meliputi religi, kekerabatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, dan teknologi. Unsur mata pencaharian dan teknologi merupakan unsur yang paling cepat berubah dan membutuhkan kecepatan dan frekuensi yang tinggi dalam pemetaannya. Sejarah dan budaya seringkali dapat dimunculkan dalam simbol yang sama. Setiap wujud kebudayaan dapat menjelaskan atau mengandung beberapa unsur kebudayaan sekaligus. Tabel 5 menunjukkan contoh perwujudan unsur kebudayaan dilihat dari bentuknya berupa: ide atau gagasan, perilaku, dan wujud material atau wujud fisik. Sedangkan Gambar 19 menunjukkan bahwa sebuah unsur kebudayaan berupa kekerabatan atau marga telah menjadi dasar penentuan wilayah administrasi sebelum tahun 1982 dibawah kecamatan. Sistem tersebut kemudian berubah setelah 1982 ketika dusun ditetapkan menjadi desa yang berdiri sendiri dibawah kecamatan.

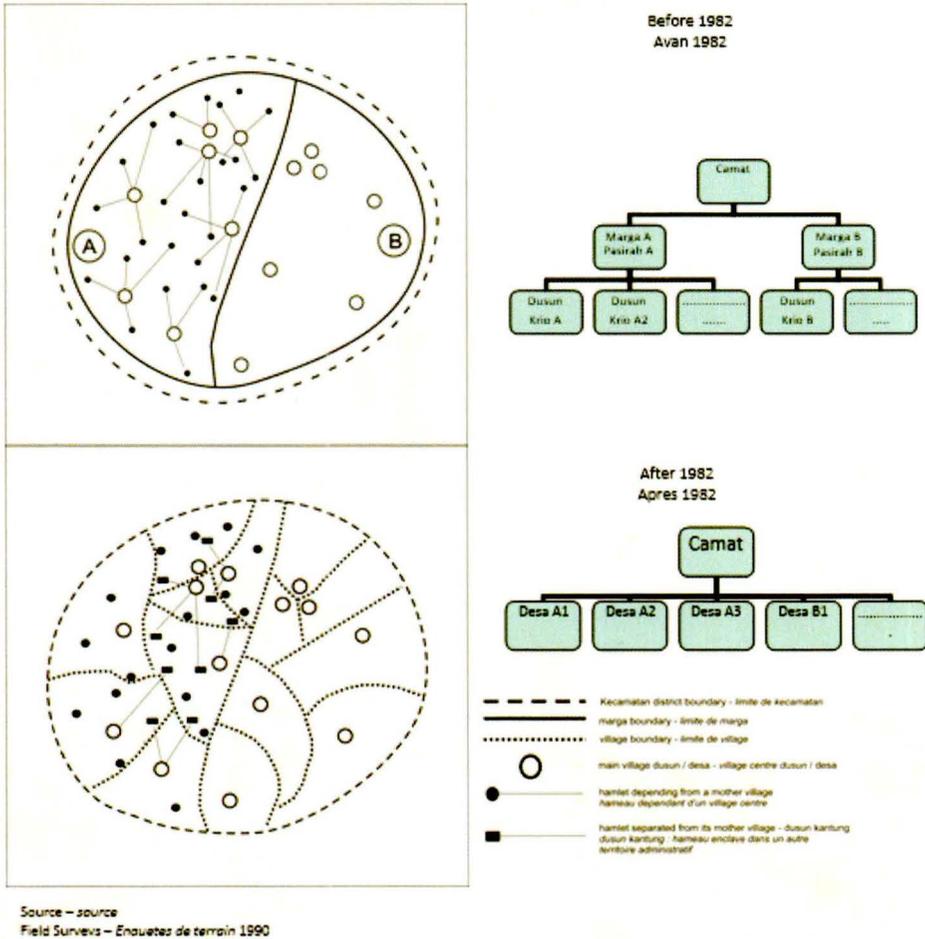
Tabel 5. Fenomena Kebudayaan

Unsur Kebudayaan	Ide/Gagasan	Perilaku	Wujud Material/ Wujud Fisik
Religi	Dewa dapat "didatangkan" ke bumi	Bertapa dan memuja	Tempat-tempat pemujaan
Kekerabatan	Kebersamaan antar anggota keluarga sangat penting	Kumpul bersama secara rutin dan bergiliran	Rumah berukuran besar



Unsur Kebudayaan	Ide/Gagasan	Perilaku	Wujud Material/ Wujud Fisik
Sistem Pengetahuan	Hutan dan mata air bersifat suci	Tidak “mengganggu” hutan	Hutan larangan
Bahasa	Cara berkomunikasi bagian dari status sosial (bahasa sebagai identitas)	Seleksi kata dan cara mengucapkannya	Variasi bahasa (bahasa ritual, bahasa gaul, bahasa dinas, bahasa “halus dan kasar”, dsb)
Kesenian	Seni bukan sekedar benda	Seleksi tempat dan waktu dalam berkesenian	Variasi tarian (tari perang, tari selamat datang, tari memuja alam, dsb)
Mata Pencarian	Hasil kerja ditentukan oleh kemurahan alam	Memanfaatkan fenomena alam untuk membangun kehidupan	Petani, peladang, nelayan
Teknologi	Waktu tidak dapat kembali	Alokasi waktu secara tepat	Jam tangan





Gambar 19. Ilustrasi Pembagian Wilayah Berdasarkan Marga dan Batas Administratif Desa

6.3.2. Pengumpulan Data

Sumber data nilai budaya dapat diperoleh dari sumber-sumber yang sama dengan pemetaan sejarah yang membedakan adalah jenis data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan untuk pemetaan nilai budaya lebih menekankan pada



detail wujud kebudayaan dilihat dari unsur-unsur kebudayaan yang terkandung didalamnya.

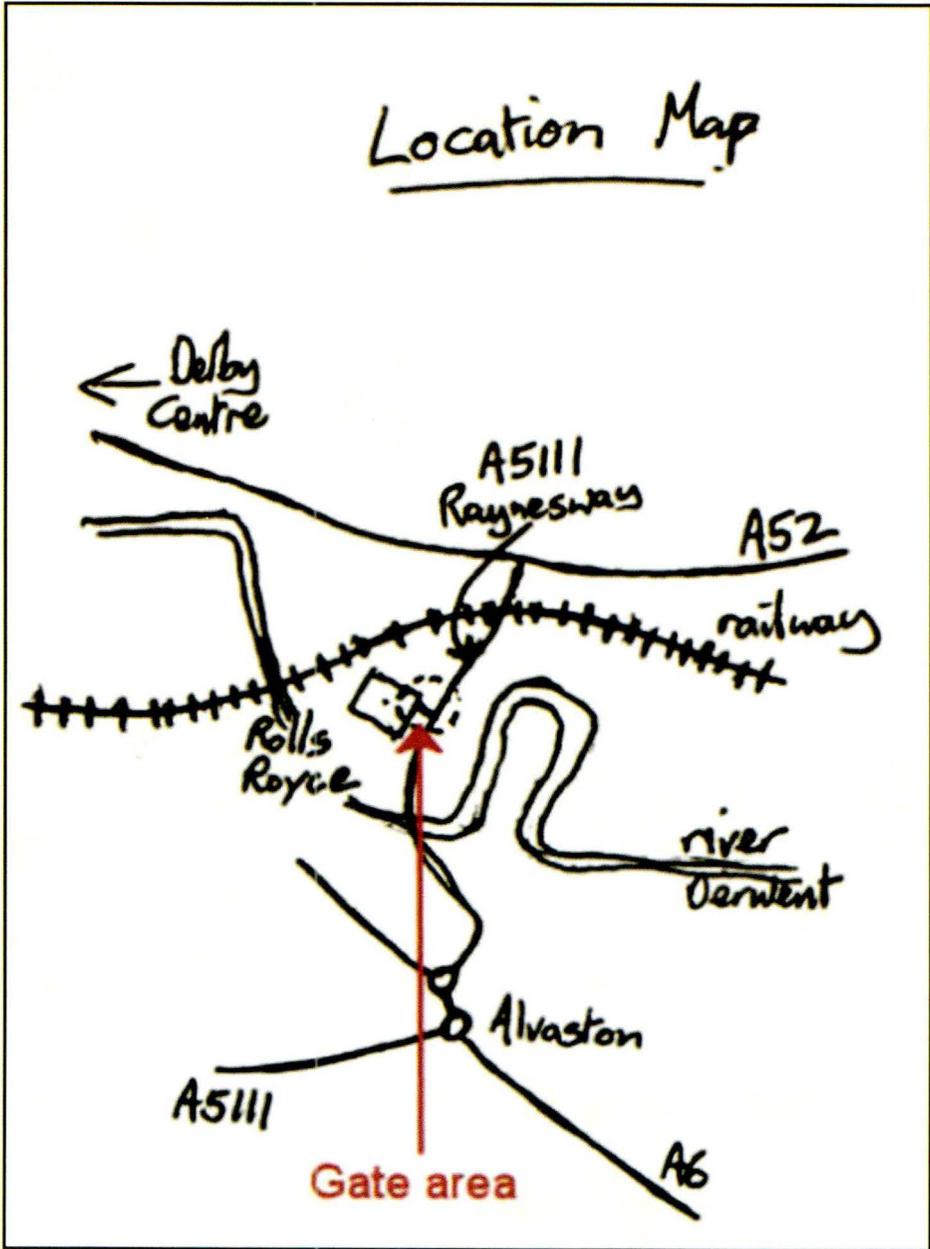
Sumber data budaya terbagi atas data tertulis, lisan, dan observasi. Sumber tertulis dapat diperoleh dari perpustakaan dalam bentuk buku, dokumen, surat kabar dan sebagainya. Sumber lisan dapat diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dengan maksud untuk memahami unsur-unsur kebudayaan yang dialami/diterapkan, dilihat dan didengar oleh informan. Sedangkan sumber data dengan metode observasi atau pengamatan didapat melalui pengalaman dari pengamat dengan merasakan tinggal bersama sebuah komunitas dalam periode waktu tertentu.

6.3.3. Pemetaan

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan, proses selanjutnya adalah memetakan wujud kebudayaan yang telah direncanakan. Oleh karena karakteristik dari kebudayaan itu tidak tetap atau statis, maka wujud kebudayaan yang akan dipetakan dibatasi pada wujud yang tidak mudah berubah. Kalau pun sering berubah, data relatif mudah diperoleh. Kemudian wujud kebudayaan yang dipetakan juga dapat membuka wawasan baru tentang kehidupan sehari-hari dan dapat membantu proses pengambilan kebijakan baik itu di tingkat lingkungan atau lokal, regional, dan bahkan hingga nasional. Wujud kebudayaan yang akan dipetakan juga harus mudah untuk dipahami oleh publik sebagai pengguna data (*end user*).

Proses pemetaan yang paling umum digunakan dalam memetakan nilai budaya yang sifatnya tidak terlihat (*intangible*) adalah dengan menggunakan metode pemetaan kolaboratif bersama masyarakat dalam menentukan batas dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Hasil pemetaan biasanya dalam bentuk peta sketsa yang digambar dan disepakati oleh masyarakat.

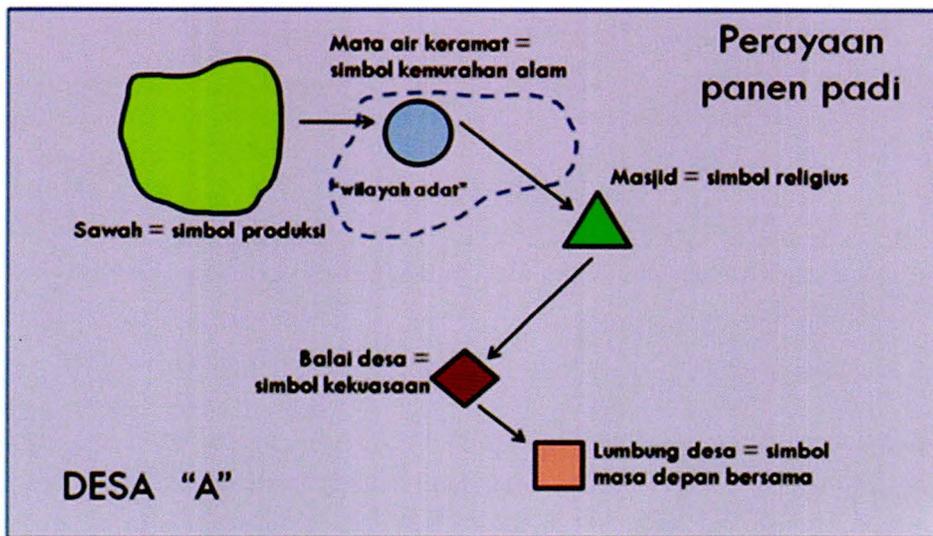




Gambar 20. Contoh Peta Sketsa Hasil Pemetaan Partisipatif



Tingkat ketelitian data dan informasi yang ditampilkan dalam peta nilai budaya bervariasi dari skala menengah hingga skala kecil (umum). Fenomena nilai budaya yang dipetakan pada umumnya memiliki luas yang cukup besar karena mencakup kawasan atau wilayah suatu masyarakat yang memiliki budaya yang sama. Fenomena nilai budaya yang dapat dipetakan misalnya tradisi kirab dari hasil panen raya di sebuah masyarakat dimana padi hasil panen (simbol produksi) di bawa ke mata air keramat sebagai simbol kemurahan alam, kemudian dibawa ke tempat peribadatan sebagai simbol religius, setelah itu hasil panen dibawa ke balai desa atau pusat pemerintahan sebagai simbol kekuasaan, dan terakhir hasil panen akan disimpan ke dalam lumbung untuk cadangan pangan mereka. (gambar 21)



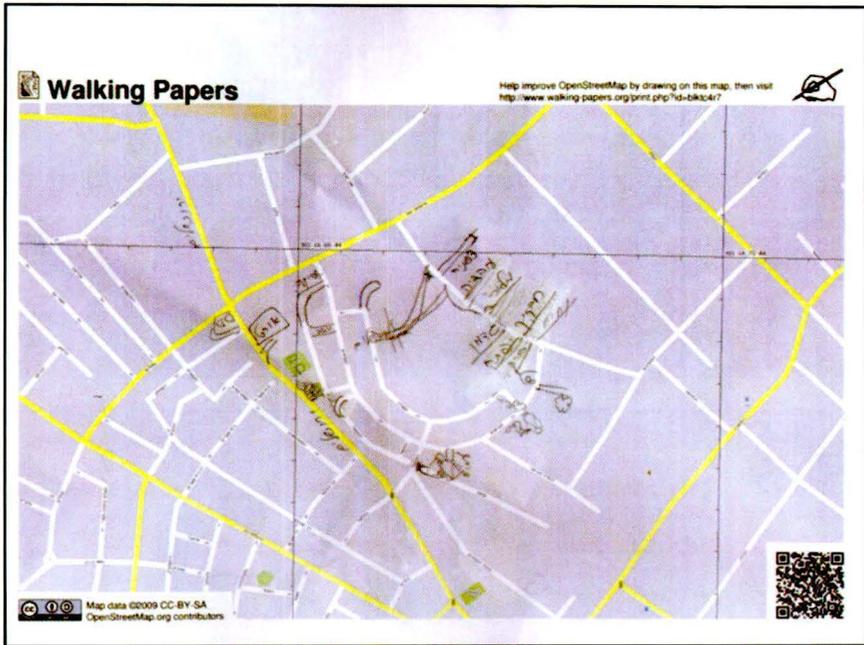
Gambar 21. Contoh Penggambaran/Symbolisasi Wujud Kebudayaan Tradisi Lokal

6.3.4. Verifikasi

Langkah verifikasi pada pemetaan nilai budaya mengarah pada verifikasi data hasil pemetaan partisipatif (sketsa) ke lapangan dengan menggunakan teknologi SIG. Verifikasi dapat dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan



GPS atau menggunakan citra satelit penginderaan jauh jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk didatangi.



Gambar 22. Peta yang Digunakan dalam Proses Verifikasi Lapangan

6.3.5. Interpretasi

Setelah mengalami proses verifikasi dilanjutkan dengan proses interpretasi atau penafsiran yang meliputi dua kegiatan yaitu analisis dan sintesis. Analisis pada tahap ini berarti mencoba menggali informasi yang ada dari data-data yang telah tergambarkan pada peta sehingga dapat diperoleh sebuah pola sebaran sebuah kebudayaan di suatu wilayah. Sintesis mengenai pola persebaran kebudayaan dapat menghasilkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sebuah kebudayaan itu menyebar atau menghilang dan apa faktor penyebab dan penghambatnya.



6.4. Publikasi Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, penyajian informasi geospasial dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
- c. peta digital;
- d. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- e. peta multimedia;
- f. bola dunia; atau
- g. model tiga dimensi.

Dalam *database* obyek sejarah dan nilai budaya, data lokasional disajikan sebagai simbol-simbol sesuai dengan karakteristik obyek tersebut. Agar obyek sejarah dan nilai budaya ini dapat dengan mudah digunakan, tampilan layar yang disajikan harus mudah dimengerti. Kemudahan menggunakan program sangatlah diperlukan, karena siapapun yang menggunakan dapat mengerti apa yang harus dilakukan.

Penyajian detil obyek sejarah merupakan hal penting yang menyangkut teknik dan seni menyampaikan informasi, selain itu, harus memperhatikan akurasi. Sajian detil yang banyak tidak selalu berkonotasi baik, karena peta akan nampak terlalu padat dan tidak informatif. Peta sejarah dan nilai budaya yang berbasis peta dijital, pengelolaan informasinya dapat dikelola lebih baik karena setiap kelompok informasi dapat disimpan pada *layer* berbeda dan secara instan dapat diatur informasi mana yang harus ditampilkan dan mana yang harus disembunyikan.



a) Pembuatan peta dan atlas digital

Peta dan atlas sejarah akan menampilkan informasi mengenai suatu peristiwa, sebab akibat, lokasi serta tokoh-tokoh yang terlibat. Peta dan atlas tersebut disusun berdasarkan *layer* tematik yang telah dibuat menggunakan prosedur dan tata cara seperti di atas. Software SIG sangat memungkinkan dalam pembuatan peta dan atlas sejarah ini karena kemampuan dalam menyimpan, memperbaharui, mengelola, mengintegrasikan, menganalisa serta menampilkan data kembali. Banyak tema sejarah yang bisa ditampilkan dengan menggunakan kemampuan analisa dan menampilkan peta dalam berbagai tema serta dalam kurun waktu yang berbeda. Dengan atlas dan peta digital pengguna dapat lebih interaktif dalam memanggil kembali serta mendapatkan informasi baru dengan *query* dari data atributnya dan bahkan membuat peta baru dari analisa ataupun *overlay* peta atau *layer* yang telah ada.

Sistem Informasi Geografis memiliki fasilitas untuk pembuatan peta atau atlas digital. Fasilitas ini hampir tersedia pada seluruh perangkat lunak SIG yang bersifat komersil. Perkembangan teknologi perangkat lunak SIG saat ini bahkan memungkinkan melakukan suatu produksi peta (*map production*). Produksi peta yang dimaksud adalah suatu teknik pemetaan otomatis dalam skala *database* yang besar. Artinya, fasilitas SIG memungkinkan melakukan otomatisasi pembuatan cetak peta dalam jumlah tak terbatas sesuai dengan volume *database* yang digunakan. Fasilitas ini, selain beberapa komponen dasar kartografi standar yang terpenuhi, komponen pewarnaan peta pada beberapa perangkat lunak SIG sudah menggunakan aplikasi sistem pewarnaan untuk industri percetakan.

Keluaran dari publikasi peta dan atlas digital biasanya dikemas dalam suatu kepingan CD (*compact disc*) yang dapat berisi dokumen mengenai pemetaan sejarah berkaitan dengan laporan kegiatan maupun hasil dari aplikasi lain yang ada didalamnya baik itu berupa *database* yang dikompilasi maupun aplikasi geospasial yang dihasilkan.



b) Pembuatan peta cetak dan atlas analog

Meski teknologi pemetaan sudah masuk pada fase pemetaan digital, bukan berarti instrumen peta/atlas analog tidak dibutuhkan lagi. Pengguna SIG (khususnya di Indonesia) masih pada lapisan terbatas, bahkan dapat dikatakan minor, tetapi pengguna peta/atlas analog di Indonesia terdiri dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari siswa sekolah dasar, akademisi, perencana, dan pengambil keputusan masih sering menggunakan peta/atlas analog dalam membaca wilayah. Hal ini karena tidak seluruh lapisan masyarakat sudah memahami SIG, hanya beberapa pengguna saja (kelompok teknis) yang selalu melakukan eksplorasi terhadap sistem informasi ini.

Seperti telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, tahapan akhir dari SIG pada umumnya adalah penyajian data spasial dalam bentuk sebuah peta yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna melalui pencetakan peta. Kemampuan SIG dalam penyajian peta adalah terpenuhinya unsur-unsur standar pemetaan yang benar. Faktor inilah yang juga membedakan SIG dengan perangkat lunak pengolah gambar lainnya, yang tidak memperhitungkan aspek geometri suatu elemen gambar.

c) Peta Interaktif berbasis jaringan internet (*Web GIS*)

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, berkembang pula teknologi SIG berbasis jaringan internet (*Web GIS*). Teknologi *Web GIS* merupakan teknologi yang kini banyak dimanfaatkan oleh institusi, lembaga, perusahaan, dan bahkan individu untuk menampilkan produk atau informasi yang mereka miliki dalam format peta interaktif dalam sebuah situs internet (*website*).

Aplikasi *Web GIS* memiliki kelebihan dalam cakupan penggunaannya yang bersifat global. Pengguna hanya membutuhkan koneksi internet dan peramban untuk mengakses informasi dalam bentuk peta interaktif. Cakupannya yang global juga membuat proses pembuatan aplikasinya murah dan mudah dalam pemutakhiran data. Setiap proses pemutakhiran data pada *server* dan *database* akan menghasilkan perubahan secara serentak



pada setiap pengguna yang mengakses aplikasi *Web GIS* dimanapun.

Pemanfaatan aplikasi *Web GIS* dalam publikasi peta sejarah dan nilai budaya akan memberikan nilai lebih, para pengguna informasinya akan sangat beragam dari murid sekolah, mahasiswa, peneliti, pemerintah, hingga masyarakat umum. Akses yang mudah melalui jaringan internet juga membantu proses sosialisasi informasi terkait sejarah dan nilai budaya. Jika sistem *Web GIS* dibuat memiliki sub sistem input data, maka sistem tersebut dapat juga menjadi sarana pengumpulan data sejarah dan nilai budaya secara partisipatif oleh masyarakat sehingga datanya akan menjadi kaya.

6.5. Proses Pembelajaran

Dalam program-programnya, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya telah menerbitkan buku Pedoman Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya yang memberikan panduan bagi staf balai di berbagai daerah di Indonesia sehingga memiliki metode yang sama untuk menghasilkan peta sejarah dan nilai budaya. Workshop-workshop yang ditujukan kepada staf balai dan guru di bidang sejarah merupakan salah satu media dalam sosialisasi pedoman pemetaan yang telah disusun. Penyeragaman metode merupakan hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan *database* sejarah dan nilai budaya dengan tingkat ketelitian yang sama.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada tiga lokasi survai menunjukkan bahwa proses pembelajaran tentang pemetaan sejarah dan nilai budaya telah berjalan dengan baik, akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia yang melakukan pemetaan menjadi kendala yang cukup besar sehingga *database* pemetaan sejarah dan nilai budaya belum merata untuk tiap-tiap daerah. Keterbatasan balai-balai di daerah dalam kepemilikan lisensi perangkat lunak SIG juga membatasi proses pengolahan data lapangan yang telah dikumpulkan.



BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

- Pengembangan sejarah dan nilai budaya sangat relevan dan penting untuk menjadi pengarus utama pembangunan nasional termasuk pembangunan budaya nasional.
- Kegiatan pemetaan sejarah dan nilai budaya dapat memberi manfaat melalui peran aktif dalam menjalankan amanah proses pembentukan jati diri dan karakter atau kepribadian bangsa sebagai bagian vital dan juga strategis dari pembangunan budaya nasional.
- Proses pembelajaran memulai pemetaan sejarah dan nilai budaya dapat bermanfaat praktis dalam membangun kognisi tempat (*place/space cognitive*) yang pada akhirnya dapat membentuk kebiasaan ruang yang berbasis pada nilai-nilai lokalitas (berbasis sejarah dan nilai budaya lokal).
- Ada indikasi peran sejarah dan nilai budaya, termasuk kegiatan pemetaannya, saat ini masih terbatas hanya dalam konteks kepentingan inventarisasi dan dokumentasi obyek sejarah dan budaya.
- Momentum rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 merupakan momentum yang tepat untuk memposisikan program pengembangan pemetaan sejarah dan nilai budaya menjadi prioritas program, sebagaimana yang ditetapkan dalam agenda prioritas pembangunan Presiden RI terpilih.

7.2. Rekomendasi

- Menetapkan program pengembangan sejarah dan nilai budaya sebagai prioritas program dalam Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Pendidikan Dasar dan Budaya. Tentu harus didahului dalam ketetapan Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian.
- Menyiapkan konsep kebijakan, strategi dan program berikut kegiatan yang merefleksikan ke-prioritas-an tersebut di atas.
- Memperkuat kapasitas satuan kerja dan kompetensi SDM dalam menangani urusan pemetaan sejarah dan nilai budaya, termasuk kapasitas memperkuat hubungan antar kelembagaan termasuk dengan pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, S. (1920). *Space, Time, and Deity*. Macmillan & Co
- Anonim (2011). *Atlas Nasional Indonesia : Sejarah*. Bogor : Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Butlin, R. A. (1993). *Historical Geography: Through the Gates of Space and Time*. (London)
- De Graaf, H.J. dan T.H. Pigeaud. (2003). *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Pustaka Utama Graffiti.
- Endraswara, Suwardi (2006). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Frederick, W. H. & Soeroto (ed). (2005). *Pemahaman sejarah Indonesia: sebelum dan sesudah revolusi*. Jakarta : LP3ES
- Hartshorne, R. (1959). *Perspective on the Nature of Geography*. Rand Mc Nally & Company, Chicago
- Hariadi, dkk (2012). *Randang Minangkabau: Warisan Leluhur yang Mendunia*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Hasanadi, dkk (2012). *Mahakarya Rumah Gadang Minangkabau*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Hasanadi, dkk (2012). *Warisan Budaya Tak Benda di Provinsi Sumatera Barat*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).





Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Kompleks Kemendikbud Gedung E Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta